



LAPORAN INTERIM Triwulan IV

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

2022

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan Interim Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Interim Triwulan IV Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Interim Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPOM di Ambon ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja untuk mendorong menyelenggarakan tugas umum dan fungsi selaku instansi pemerintah dengan baik.

Pada tanggal 13 Desember 2021 telah dilakukan review Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024 dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2021-2024.

Dengan disusunnya Laporan Interim Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan/ tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada Triwulan berikutnya.

Ambon, 20 Januari 2023
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon



...hanto, S.Si., Apt. MPPM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Interim Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024, yang terdiri dari 29 Indikator Kinerja Utama.

Berikut **capaian keberhasilan** tiap sasaran strategis tersebut :

1. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkungan kerja Balai POM di Ambon” dengan NPS sebesar 93,48% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.
2. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 95,15% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.
3. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 99,77% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**;
4. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik” dengan NPS sebesar 107,35% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**;
5. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 99,57% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**;
6. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 99,09% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**;
7. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 112,82% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**;
8. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal” dengan NPS sebesar 101,19% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**;


9. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” dengan NPS sebesar 100,52% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”;
10. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan sasaran “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan NPS sebesar 112,06% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”;
11. Pada Triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah “Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel” dengan NPS sebesar 96,60% dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”;

Persentase capaian target indikator kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada Triwulan IV antara 85,35% sampai dengan 126,99%. Realisasi indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.”

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.”

Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang ditelah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh BPOM di Ambon. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Ambon, 20 Januari 2023
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Hermanto, S.Si., Apt. MPPM 

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	10
Daftar Gambar	18
Daftar Lampiran	24
BAB I Pendahuluan	25
1.1 Latar Belakang	25
1.2 Gambaran Umum Organisasi	26
1.3 Struktur Organisasi	27
1.4 Isu Strategis	28
BAB II Perencanaan Kinerja	74
2.1 Rencana Strategis	74
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021	80
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2021	84
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2021	88
2.5 Metode Pengukuran	91
BAB IV Akuntabilitas Kinerja	92
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	92
3.2 Realisasi Anggaran	243
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	244
BAB IV Penutup	249
4.1 Kesimpulan	249
4.2 Saran	250
Lampiran	253

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	31
Tabel 2. Perubahan Arah Kebijakan Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon	76
Tabel 3. Perubahan Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon 2020-2024	78
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2021 (awal)	79
Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2021 (revisi)	81
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon Tahun 2021....	83
Tabel 7. Perbandingan Perubahan Target dalam Perjanjian Kinerja awal dan revisi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2021	85
Tabel 8. Rencana Aksi Perjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2021	87
Tabel 9. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2021	93
Tabel 10. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Cluster 8	95
Tabel 11. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Ambon Tahun 2021	96
Tabel 12. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021	100
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 BPOM Ambon	100
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	101
Tabel 15. Perbandingn Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2021 dengan balai lain sejenis dan target nasional	101
Tabel 16. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021	105
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 BPOM Ambon	105
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	106
Tabel 19. Perbandingn realisasi kinerja tahun 2021 dengan balai lain sejenis dan target Nasional	106
Tabel 20. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021	110
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 BPOM Ambon	110

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	111
Tabel 23. Perbandingan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan balai lain sejenis dan target nasional	111
Tabel 24. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021	116
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 BPOM Ambon	116
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	117
Tabel 27. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan balai lain sejenis dan target nasional	117
Tabel 28. Hasil uji TMS untuk sampling targeted/ purposive tahun 2021	118
Tabel 29. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat tahun 2021	120
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 BPOM Ambon	120
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	121
Tabel 32. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan balai lain sejenis dan target nasional	121
Tabel 33. Fortifikasi garam, tepung terigu dan minyak goreng	122
Tabel 34. Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat	124
Tabel 35. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu dengan Target Tahun 2021	125
Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2021 dengan Tahun 2020	125
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2021 Terhadap Target renstra 2024	126
Tabel 38. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara dan Target Nasional	126
Tabel 39. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021	131
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 BPOM Ambon	131
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024	

B POM Ambon	132
Tabel 42. Perbandingan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional	132
Tabel 43. Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	136
Tabel 44. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021	136
Tabel 45. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 dengan Tahun 2020	136
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 terhadap Target Renstra 2020-2024	137
Tabel 47. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara dan Target Nasional	137
Tabel 48. Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	141
Tabel 49. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM target dan realisasi tahun 2021	141
Tabel 50. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2021 dengan Tahun 2020	141
Tabel 51. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2021 Terhadap Target Renstra 2020-2024	142
Tabel 52. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 8) dan Target Nasional	142
Tabel 53. Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021	146
Tabel 54. Perbandingan Realisasi keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2020 BPOM Ambon	147
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	148
Tabel 56. Perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 dengan balai lain sejenis	

dan target nasional	148
Tabel 57. Presentase rekomendasi Tindak Lanjut hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	149
Tabel 58. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021	151
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 dengan tahun 2020 BPOM Ambon	151
Tabel 60. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	152
Tabel 61. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 dengan balai lain sejenis dan target nasional	153
Tabel 62 Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021	155
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Kinerja Tahun 2020 dengan tahun 2021 BPOM Ambon	156
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	157
Tabel 65 Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 dengan balai lain sejenis dan target nasional	157
Tabel 66. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat	158
Tabel 67. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021	161
Tabel 68. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 dengan tahun 2020	162
Tabel 69. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	162
Tabel 70. Perbandingn Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 dengan relaisasi Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target Nasional	163
Tabel 71. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat	163
Tabel 72. Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi	

ketentuan tahun 2021	165
Tabel 73. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan tahun sebelumnya	166
Tabel 74. Perbandingan Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	167
Tabel 75. Perbandingn Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 dengan relaisasi Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target Nasional	167
Tabel 76. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik	171
Tabel 77. Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2021	172
Tabel 78. Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2021 dengan Tahun 2020	172
Tabel 79. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2021 Terhadap Target Renstra 2020-2024	173
Tabel 80. Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara dan Target Nasional	173
Tabel 81. Bobot Idikator Efektivitas KIE Obat dan Makanan	177
Tabel 82. Interpretasi Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan	178
Tabel 83. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021	178
Tabel 84. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2021 dengan Tahun 2020	178
Tabel 85. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Terhadap Target renstra 2020-2024	178
Tabel 86. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 8) dan Target Nasional	179
Tabel 87. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2021	183
Tabel 88. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2021 dengan Tahun 2020	183
Tabel 89. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Terhadap Target renstra 2020-2024	184
Tabel 90. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 8) dan Capaian Nasional	184
Tabel 91. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2021	188

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon .	27
Gambar 2. Audiensi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan Pemerintah Daerah	29
Gambar 3. Analisis SWOT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	30
Gambar 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	32
Gambar 5. Jumlah seluruh SDM (PNS dan PPNPN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dibandingkan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2021	33
Gambar 6. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2021 berdasarkan tingkat Pendidikan.....	33
Gambar 7. Peta Provinsi Maluku	35
Gambar 8. Bimbingan Teknis Internal Jaminan Hasil Pengujian	37
Gambar 9. Pelatihan Pelayanan Prima Registrasi Obat Tradisional	38
Gambar 10. Bimbingan Teknis Pengujian GCMS.....	39
Gambar 11. Uji Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.....	39
Gambar 12. Pelatihan Pelayanan Publik.....	40
Gambar 13. Bimbingan Teknis oleh PPSPM	40
Gambar 14. Sosialisasi Terkait Bahaya Narkoba	41
Gambar 15. Kunjungan dan Pembinaan ke Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kep. Tanimbar.....	41
Gambar 16. Layanan Parkir yang Lapang, Sistem Keamanan Gate (Oleh Satpam dan CCTV) serta Sistem Parkir dengan Karcis Parkir pada Gate Masuk	42
Gambar 17. Layanan 5S, Ruang Tunggu yang nyaman dengan berbagai fasilitas	42
Gambar 18. Ketersediaan tempat duduk prioritas, kursi roda, parker, dan toilet untuk penyandang disabilitas	43
Gambar 19. Pembayaran secara elektronik (mesin EDC atau mobile banking)	43
Gambar 20. Smart TV yang dimanfaatkan untuk memberi motivasi bagi pegawai	44
Gambar 21. Pohon Motivasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	44
Gambar 22. GCMS, Lemari Asam dan Blender Mixer Pengadaan Tahun 2021	45
Gambar 23. Rapat Perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	46

Gambar 24. Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	47
Gambar 25. Desk Evaluasi dengan Tim Evaluator KemenPAN RB	48
Gambar 26. Koordinasi Terpadu	48
Gambar 27. Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa	49
Gambar 28. Kegiatan Bimtek Petugas Pasar Aman	49
Gambar 29. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah	50
Gambar 30. Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon melakukan kegiatan pengawasan Takjil	50
Gambar 31. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah PJAS	51
Gambar 32. Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon melakukan Sampling Rutin PJAS	51
Gambar 33. Bimtek Komunitas Desa	51
Gambar 34. Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi sepanjang tahun 2021	53
Gambar 35. Pemeriksaan Saryankes	53
Gambar 36. Inspeksi Pemenuhan CPPOB Sarana Produksi	54
Gambar 37. Pengawasan Distribusi Vaksin COVID-19	54
Gambar 38. Pemeriksaan Sarana Produksi Air Minum Dalam Kemasan di Ambon	55
Gambar 39. Kegiatan Intensifikasi Pangan menjelang hari Raya	55
Gambar 40. Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon melakukan pemeriksaan dalam rangka penertiban peredaran antibiotic pada sarana distribusi obat	56
Gambar 41. Advokasi Terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman	57
Gambar 42. FGD Pelayanan Publik	57
Gambar 43. Koordinasi Lintas Sektor dengan KPP Bea Cukai	58
Gambar 44. Advokasi Criminal Justice System	58
Gambar 45. FGD dengan Fakultas Unpatti Ambon	59
Gambar 46. Monev Terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman	60
Gambar 47. Konferensi Pers Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon 2021	60
Gambar 48. Kerja sama Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon dengan KPID Maluku	61
Gambar 49. Kerjasama BPOM Ambon dengan BNN Provinsi Maluku	61
Gambar 50. Koordinasi Lintas Sektor Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon dengan Ombudsman Maluku	62
Gambar 51. Kegiatan KIE Online	63
Gambar 52. Kegiatan Talkshow BPOM Ambon	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Awal)	253
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Revisi)	257
Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	262
Lampiran 4. Rencana Kinerja BPOM Ambon Tahun 2021	264
Lampiran 5. Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPOM Ambon Tahun 2021 (dengan Perjanjian Kinerja Revisi)	271
Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPOM Ambon Tahun 2021	271
Lampiran 7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BPOM Ambon Tahun 2021	273
Lampiran 8. Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2021	274
Lampiran 9. Perbandingan Realisasi Kinerja BPOM Ambon Tahun 2021 dengan Tahun 2020	275
Lampiran 10. Perbandingan Realisasi Kinerja BPOM Ambon Tahun 2021 dengan Renstra 2020-2024	276
Lampiran 11. Perbandingan Kinerja BPOM Ambon dengan BBPOM Palangkaraya dan Target Nasional	277
Lampiran 12. Perbandingan Kinerja BPOM Ambon dengan BPOM Kupang dan BPOM Kendari	278
Lampiran 13. Ringkasan Perbandingan NPS Balai Sejenis	279
Lampiran 14. Penilaian Indeks BPOM di Ambon Tahun 2021	280

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai UPT dari BPOM bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Maluku.

Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan melekat pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan di Provinsi Maluku dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan, baik di hulu maupun di hilir.

Tupoksi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector strategis ekonomi domestik.

Oleh karena itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi informasi dan lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut.

Pembuatan laporan kinerja tahunan sangat penting untuk dibuat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Tugas

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, BPOM di Ambon mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

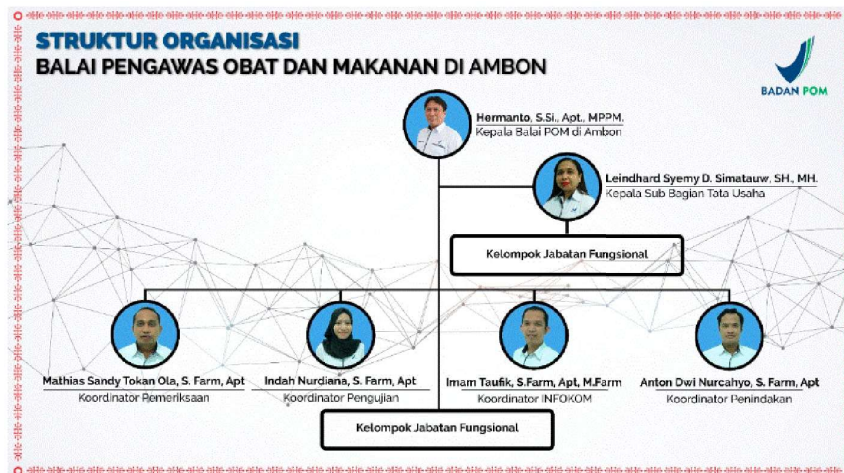
Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Substansi dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. **Kelompok Substansi Pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan

Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler.

3. **Kelompok Substansi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
4. **Kelompok Substansi Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai bagian integral dari Badan POM dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan di bidang obat dan makanan kepada masyarakat/konsumen khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar atau penggunaan produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan, maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk yang beredar tersebut mempunyai keamanan, mutu, dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai institusi Pengawas Obat dan Makanan di daerah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon akan terus meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon agar lebih dirasakan manfaat keberadaannya bagi masyarakat di Maluku khususnya dan Indonesia secara umum.

Dalam membangun kemitraan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Audiensi Kepala Balai POM di Ambon dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon tanggal 03 November 2022 terkait program “Pesta Kenari” (Penerbitan Ijin Edar PIRT)
- b. Audiensi Kepala Balai POM di Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Ditreskrimsus Polda Maluku tanggal 28 Oktober 2022 terkait cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada sirup obat
- c. Talkshow TVRI tanggal 13 Desember 2022 Terkait Pengawasan Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru
- d. Konferensi Pers BPOM di Ambon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon tanggal 19 Desember 2022 Terkait Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Hari Raya Natal 2022 Dan Tahun Baru 2022
- e. Audiensi Kepala Balai POM di Ambon dan BI tanggal 19 Oktober 2022 terkait rangka menjalin sinergisme antar Lembaga untuk memajukan dan meningkatkan kapasitas UMKM yang ada di Provinsi Maluku agar naik kelas dan mampu berdaya saing.





Gambar 2. Audiensi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan Pemerintah Daerah dan BI

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 3 berikut :



Gambar 3. Analisis SWOT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang Profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga Kepercayaan Publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan full spectrum
3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan
4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan public
5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.2.1 INTERNAL

1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 30 September 2022 adalah sejumlah 56 (lima puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejumlah 10 (sepuluh) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 31 Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk pegawai PNS, terhitung sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) termasuk 4 (empat) pegawai yang menjadi Koordinator Kelompok Substansi yang menjabat sebagai PFM dan sisanya menjabat sebagai fungsional tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional umum atau pelaksana/tugas belajar dan struktural sebanyak 13 (tiga belas) pegawai. Kemudian untuk PPNPN, sebanyak 18 pegawai adalah PPNPN teknis dan sisanya 13 pegawai adalah PPNPN non-teknis. Berikut beberapa tabel data pegawai BPOM di Ambon pada tahun 2022 :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

No	Kategori	Jumlah Pegawai
1	PNS	56
2	CPNS	10
3	PPNPN	31
Total		97

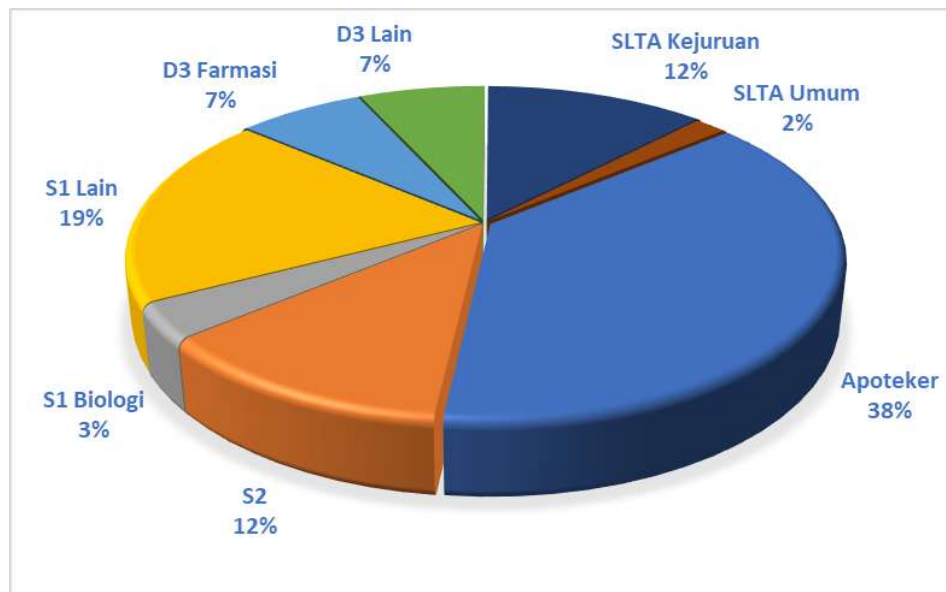


Gambar 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 126 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 56 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 10 Calon Pegawai Negeri Sipil dan 31 orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 29 orang guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.



Gambar 5. Jumlah seluruh SDM (PNS dan PPNPN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dibandingkan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022



Gambar 6. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022 berdasarkan tingkat Pendidikan

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk

memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat pada tahun 2022 sebanyak 2 pegawai diberikan tugas untuk melakukan Tugas Belajar dan 2 pegawai Izin belajar.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m² dengan luas lantai Bangunan sebesar 2.457 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pada tahun 2018 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam tahap perluasan bangunan Laboratorium Mikrobiologi seluas 690 m². Dalam mendukung upaya percepatan penanganan pengujian sampel spesimen Covid-19, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon melengkapi fasilitas laboratorium biomolekuler demi mendukung pengujian sampel spesimen Covid-19. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon. Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Selain itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun system manajemen mutu berdasarkan Standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2022 sebesar Rp22.551.018.000,- (Dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan belas ribu rupiah)

Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp22.493.574.379,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99.75%.

1.4.2.2 EKSTERNAL

1.4.2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km², yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km², dengan kata lain 90 wilayah provinsi Maluku adalah lautan.



Gambar 7. Peta Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi 2020.

Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat

- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten. Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut dan udara.

1.4.2.2.2 Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, selama triwulan IV tahun 2022 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 1042 sarana dengan rincian sarana produksi OMKA sebanyak 93, sarana distribusi OMKA termasuk sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 949.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Triwulan IV

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sejumlah 56 (lima puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 (sepuluh) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 31 Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang telah ditetapkan, jumlah SDM Balai POM di Ambon tersebut masing sangat kurang sejumlah 29 orang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di Provinsi Maluku,

mengingat jumlah ABK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sejumlah 126 orang pada tahun 2022. Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus selalu melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan pengembangan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Dimana kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan selama triwulan IV tahun 2022, sebagai berikut :

A. Bimtek Pengujian Mikrobiologi

Sebagai upaya peningkatan kompetensi personil laboratorium, BPOM di Ambon selenggarakan Bimtek internal dengan tema "Pengujian Mikrobiologi pada Sediaan Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik" pada tanggal 10-14 Oktober 2022 dan diikuti oleh 8 orang personil uji Laboratorium Mikrobiologi dan Biomolekuler bersama dengan Narasumber dari P3OMN Badan POM, Yus Hanggono Cahyaning Yudi, S.Pd, M.Sc



Gambar 8. Bimtek Internal Pengujian Mikrobiologi

B. Pelatihan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Bagi Petugas, Kolaborasi BPOM Ambon dan Unit Pusat BPOM RI

BPOM Ambon dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (Ditwasdar PO) BPOM RI berkolaborasi menyelenggarakan Pelatihan Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) Bagi Petugas, secara hybrid bertempat di Ruang Pattimura BPOM Ambon dan melalui zoom, Senin-Selasa (28-29/11). Pelatihan KLB ini diselenggarakan oleh BPOM Ambon dalam merespon terjadinya 2 KLB-KP yang terjadi di Provinsi Maluku pada semester 2 tahun 2022. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kompetensi bagi petugas Balai dan petugas

Puskesmas serta Dinas Kesehatan dalam merespon dan menangani secara tepat dan cepat kasus KLB yang terjadi di wilayah Maluku. Pelatihan KLB-KP ini juga untuk mengakomodir kompetensi petugas sebagaimana yang diamanahkan dalam regulasi yaitu UU Pangan No 18 tahun 2012, PP Keamanan Pangan No 86 Tahun 2019 serta Permenkes KLB Keracunan Pangan No 2 tahun 2013. Pelatihan ini diikuti oleh 60 orang peserta baik yang hadir secara luring maupun daring yang terdiri dari petugas BPOM Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Puskesmas Nania Kota Ambon, BBPOM Palembang, BBPOM Semarang, BBPOM Pekanbaru, Loka POM Banyumas, Loka POM Tanimbar serta Loka POM Indragiri Hulu. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini diisi oleh materi yang disampaikan oleh narasumber ahli di bidangnya. Terdapat 5 materi yang dipaparkan, yaitu Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yaitu Ibu Dra Ratna Irawati Apt MKes, Step by Step Investigasi KLB-KP oleh Dr Citra Indriani MPH dari Departemen Biostatistik Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK-KMK UGM, Teknik Advokasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan KLB-KP oleh Dasep Wahidin SSi Apt MSc PhD, Tata Cara Pengambilan Contoh dan Pengujian Oleh Fatatai SFarm Apt MAB, serta Aplikasi Spimker dan Pelaporan oleh Prita Dwi Lasnita Sitanggang STP.



Gambar 9. Pelatihan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Bagi Petugas, Kolaborasi BPOM Ambon dan Unit Pusat BPOM RI

C. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian

Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian yang merupakan salah satu sub menu kegiatan pembinaan dan pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan Yang penadanaannya bersumber dari BOK DAK NF

POM TA 2022. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini seluruh penanggungjawab fasilitas kefarmasian diharapkan semakin meningkat kompetensinya dan bertanggungjawab dalam pengelolaan ONPP dan OOT, serta memahami isu – isu terkini terkait obat dan dapat bertindak sebagai agen dalam menginformasikan hal-hal yang benar kepada masyarakat.



Gambar 10. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja dll. Dalam berupa bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Gedung Layanan Publik belum terselesaikan sehingga perlu dilakukan optimalisasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Etika kerja sangat mempengaruhi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga proses terciptanya pengawasan yang baik terhadap obat dan makanan. Peningkatan fasilitas laboratorium juga sangat penting di era yang akan datang, dikarenakan semakin meningkatnya kemampuan mereka yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif bagi masyarakat lainnya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang disabilitas.



Gambar 11. Layanan Parkir yang Lapang, Sistem Keamanan Gate (Oleh Satpam dan CCTV) serta Sistem Parkir dengan Karcis Parkir pada Gate Masuk



Gambar 12. Layanan 5S, Ruang Tunggu yang nyaman dengan berbagai fasilitas



Gambar 13. Ketersediaan tempat duduk prioritas, kursi roda, parker, dan toilet untuk penyandang disabilitas



Gambar 14. Pembayaran secara elektronik (mesin EDC atau mobile banking)

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku, yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku.

BPOM Ambon juga melakukan pengadaan Peralatan Laboratorium untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.



Gambar 15. 40' high performance dry block incubator

1.4.3.3 Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Dikatakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, Kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 pertama kehidupan (HPK), Stunting menjadi masalah serius yang perlu ditangani bersama. Provinsi Maluku BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman) dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam mengatasi generasi Stunting selama triwulan IV tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- A. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon melaksanakan kegiatan IE Keamanan Pangan dan Higiene Sanitasi di lokasi KLB Desa Tungwatu Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru



Gambar 16. Kegiatan IE Keamanan Pangan dan Higiene Sanitasi di lokasi KLB Desa Tungwatu Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

- B. Bimbingan Teknis Komunitas Desa Fatmite dan Leku Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan pangan di desanya



Gambar 17. Bimbingan Teknis Komunitas Desa Fatmite dan Leku Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan

- C. Pelaksanaan Rencana Aksi Keamanan Pangan Negeri Passo untuk terus mengawal keamanan pangan di desa adalah melalui rencana aksi keamanan pangan desa tahun 2022 yang kemudian dituangkan dalam RAB anggaran dana desa.



Gambar 18. Pelaksanaan Rencana Aksi Keamanan Pangan Negeri Passo

1.4.3.4 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat.

Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan

kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre - market melalui sertifikasi CPOB dan post - market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Beberapa upaya yang dilakukan guna perbaikan berkesinambungan pengelolaan Obat JKN adalah :

- a) Pengadaan sistem kendali inventori obat berbasis web
- b) Perkembangan sistem *e-Katalog* : Multi winner dan Multiyear
- c) *e - Purchasing* oleh penyelenggara sistem elektronik farmasi.

Sepanjang triwulan IV tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah berkomitmen dan melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan untuk mendukung Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional, seperti :

A. Pemeriksaan sarana distribusi pangan di Provinsi Maluku secara rutin



Gambar 19. Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi

B. Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku



Gambar 20. Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku

C. Percepatan Penerbitan Izin Edar Melalui Desk Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku



Gambar 21. Percepatan Penerbitan Izin Edar Melalui Desk Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku

D. Pemeriksaan sarana pelayanan Kesehatan daerah



Gambar 22. Pemeriksaan Saryankes

1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang berfungsi mengawasi beredarnya obat dan makanan, mempunyai tugas yang tidak mudah. Tak hanya luasnya wilayah Indonesia, maraknya kejahatan cyber obat dan makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Badan POM. Badan POM terus berbenah, termasuk membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas maupun kualitas. Kompetensi SDM Badan POM harus terus ditingkatkan untuk menjaga Indonesia terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya.

Pengawasan Obat dan Makanan memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak (multisektoral) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Permendagri 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Balai POM di Ambon juga tak henti melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu mengkonsumsi obat dan makanan yang memenuhi standar.

- a. BPOM Ambon Tetap Kawal Keamanan Pangan Desa di Jazirah Leihitu Maluku Tengah



Gambar 23. BPOM Ambon Tetap Kawal Keamanan Pangan Desa di Jazirah Leihitu Maluku

Tengah

- b. BPOM Di Ambon Berikan Pelatihan Penanganan KLB Keracunan Pangan Untuk Petugas Kesehatan Di Kab. Aru



Gambar 24. BPOM Di Ambon Berikan Pelatihan Penanganan KLB Keracunan Pangan Untuk

Petugas Kesehatan Di Kab. Aru

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0 Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (fusion) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam platform.

Dampak *e - commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat.

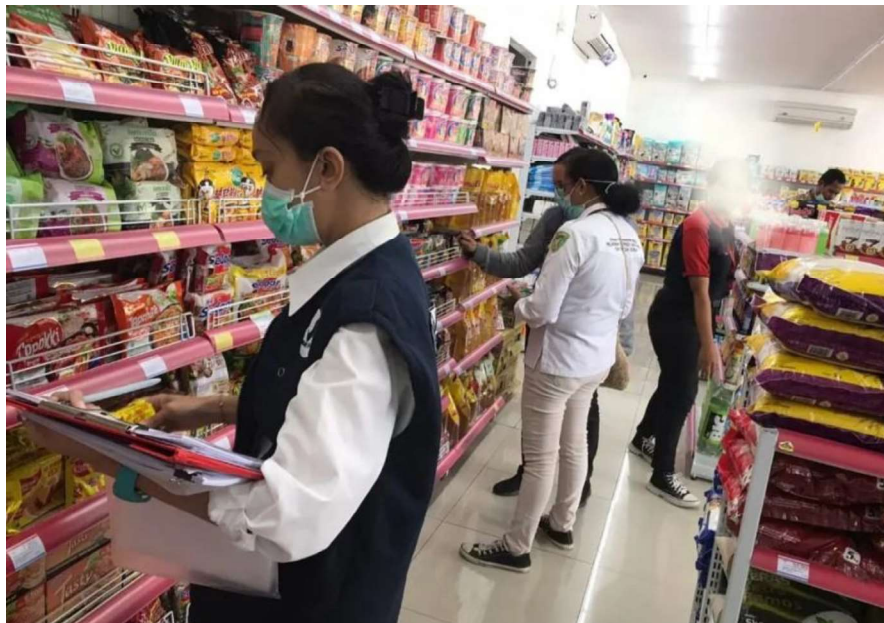
Untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa mengancam keamanan obat dan pangan man, maka sepanjang tahun 2021 BPOM di Ambon melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi :

A. Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan, Iklan Dan Recall Di Kab. SBB



Gambar 25. Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan, Iklan Dan Recall Di Kab. SBB

B. Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Nataru Di Tual Dan Maluku Tenggara



Gambar 26. Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Nataru Di Tual Dan Maluku Tenggara

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99 .

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menasar pada UMKM. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sepanjang tahun 2022 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yaitu :

- A. Sebagai salah satu sektor pendukung ekonomi kerakyatan, UMKM Pangan perlu didorong untuk mendaftarkan izin edar produknya dengan begitu masyarakat atau calon konsumen akan semakin yakin dengan produk tersebut. BPOM di Ambon fasilitasi izin edar PIRT bagi UMKM Pangan gratis tanpa dipungut biaya apapun melalui program inovasi Pesta Kenari atau Pendampingan Penerbitan SPP-IRT bagi UMKM Pangan dalam Sehari.



Gambar 27. Kegiatan peninjauan Sarana Produksi UMKM

- B. Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon melakukan pendampingan pelaku usaha terkait dokumen dan alur yang dilakukan untuk registrasi izin edar produk Obat Tradisional.



Gambar 28. Kegiatan pendampingan pelaku usaha UMKM

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan. Dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan Pengawasan terhadap Obat dan Makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi peluang mudahnya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian, KIE dan pengujian. Sepanjang tahun Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah berkomitmen dan melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

- A. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan (uji pihak ketiga)
- B. Mendukung Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan program DAK NF (implementasi juknis) regional timur yg dilaksanakan oleh pusat di Ambon untuk menu pangan, maupun secara daring untuk menu obat dan obat tradisional.
- C. Memberikan konsultasi pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi petugas pengelola obat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (menyiapkan materi dan sebagai narasumber) pada beberapa kabupaten / kota

- D. Memberikan konsultasi pelaksanaan sosialisasi/bimtek bagi pelaku usaha IRTP (menyiapkan materi dan sebagai narasumber) pada beberapa kabupaten / kota
- E. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan PKP dan DFI dgn berkoordinasi dgn BAPELKES setempat sebagai pelaksana pelatihan
- F. Monev oleh pimpinan secara langsung pada beberapa kabupaten / kota dan monev melalui *SMARTPOM* (verifikasi laporan kegiatan DAK)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

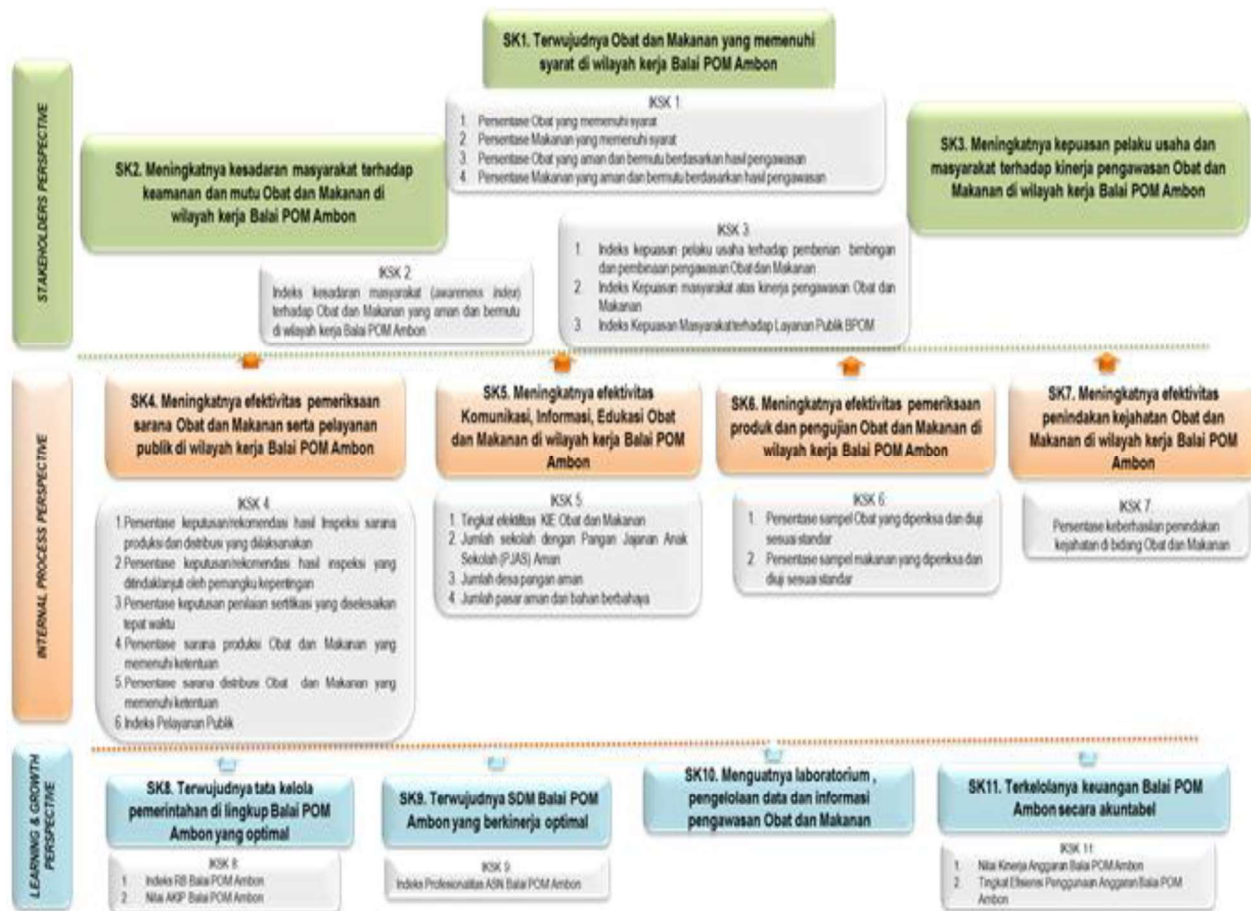
TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai POM di Ambon dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Ambon dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Ambon akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut:



Gambar 24. Peta Strategi Level II Balai POM di Ambon

STRATEGI BALAI POM DI AMBON

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Strategi Balai POM di Ambon 2020-2024

Strategi
1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risikotermasuk regulasi, perluasancakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

7. Penguatan Pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. HK.02.02.29A.29A5.12.21.334 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022.

*Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Balai POM di Ambon Tahun 2022*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat	96,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,58
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Ambon	96,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00

	di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00
		Indeks Pelayanan publik	4,45
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56,00
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Balai POM di Ambon yang optimal	Indeks RB di Balai POM di Ambon	86,00
		Nilai AKIP di Balai POM di Ambon	77,40
9	Terwujudnya SDM di Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai POM di Ambon	82,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan di Balai POM di Ambon secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran di Balai POM di Ambon	93,00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 16 Desember 2021 yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp 23.670.173.000,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Namun pada pertengahan tahun terjadi refocusing anggaran yang tersedia menjadi sebesar **Rp. 21.251.466.000,-** (Dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2022

	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00
		5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60

	pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71,58
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,45
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56,00
		19	Jumlah desa pangan aman	18
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	86,00
		25	Nilai AKIP UPT	77,40
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00

Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang digambarkan pada Peta Strategis Level II Balai POM secara umum tidak mengalami perubahan pada Sasaran Strategis.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon selalu dimonitoring setiap triwulan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2021

Dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja (PK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2021, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022 yang memuat target capaian secara triwulan yang disertai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022 :

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Balai POM di Ambon tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022												Anggaran
		BPOM di Ambon												
		Badan Pengawas Obat dan Makanan												
		Target												
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	368.588.980,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	177.252.900,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	465.534.560,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	274.469.980,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	71.153.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												80	118.283.500,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pembinaan bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89,6	30.715.000,00
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												71,98	118.283.500,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												96	27.725.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	230.624.700,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	208.225.500,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	150.000.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	26.271.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	434.599.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4,45	200.803.000,00
16.	Persentase UPMK yang mematuhi standar produksi pangan olahan dan/atau perubatan OT dan kosmetik yang baik	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78.881.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	240.070.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	10	20	30	40	50	56	62	70	83	95	96	831.537.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	25	35	40	50	60	75	85	95	95	911.079.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	17	28	35	44	55	64	75	85	92	96	100	581.948.800,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	18	30	40	50	60	68	75	85	90	95	100	200.035.440,00
22.	Persentase laboratorium penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	8	12	15	20	25	30	40	50	60	70	70	792.434.000,00
23.	Indeks RS UPT												96	70.426.000,00
24.	Nilai AICP UPT												77,40	34.529.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												80,75	702.459.340,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GUP												75	8.030.330.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			0,5			1				1,575		2,28	122.444.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			14			37,5				65,5		93	10.451.340.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	30	40	50	54	62	70	85	95	6	367.369.000,00
Total													23.676.175.000,00	

Ambon, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Ambon



Hermanto, S.Si., Apt., MPPH

RI :
 a) Target di bawah ini :
 a) Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
 b) Desa Pangan Aman
 c) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
 d) UPMK yang mematuhi standar Produksi Pangan Olahan dan Perubatan OT dan Kosmetik yang Baik

2.5 Metode Pengukuran

Metode pengukuran dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja didasarkan atas defenisi operasional yang tertuang dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian : > 120 %
Memenuhi Ekspektasi	Capaian : $100 \% \leq X \leq 120 \%$
Belum Memenuhi Ekspektasi	Capaian : $80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak Memenuhi Ekspektasi	Capaian : $X < 80 \%$

Gambar 25. Kriteria pencapaian Sasaran Strategis

Penetapan ini bertujuan untuk :

- i. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
- ii. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang penanggungjawab data di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BPOM di Ambon
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online (<https://sites.google.com/view/bpomambon2022/>) secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi eperformace.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui system informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 hingga eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward dan punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Untuk Indikator positif / polarisasi *maximize* (semakin **tinggi** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Untuk Indikator negatif / polarisasi *minimize* (semakin **kecil** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis BPOM di Ambon sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada Peta yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk

masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Triwulan IV

Kode SS	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Kriteria
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	93,48	Belum Memenuhi Ekspektasi
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	95,15	Belum Memenuhi Ekspektasi
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon	99,77	Belum Memenuhi Ekspektasi
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	107,35	Memenuhi Ekspektasi
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	99,57	Belum Memenuhi Ekspektasi
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	99,09	Belum Memenuhi Ekspektasi
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	112,82	Memenuhi Ekspektasi
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	101,19	Memenuhi Ekspektasi
SS9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	100,52	Memenuhi Ekspektasi
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	112,06	Memenuhi Ekspektasi
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	96,60	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja BPOM di Ambon Triwulan IV Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	NPS (%)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g=(f/e) \times 100$
Nilai Pencapaian Sasaran						
Stakeholder Perspective						96,35
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55	81,89	94,61
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	84,96	93,36
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	73,40	85,35
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	86,67	98,48
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,00	91,76	95,59
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	80,00	76,12	95,15
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60	92,87	103,65
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71,58	71,15	99,40
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,00	92,41	96,26
Internal Process Perspektif						104,96
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00	100,00	102,04
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	74,55	112,95
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04

		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	78,49	109,02
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,01	100,01
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,45	4,38	98,43
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	97,78	126,99
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	93,76	98,28
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56,00	56	100,00
		19	Jumlah desa pangan aman	18,00	18	100,00
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	6	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	98,19	98,19
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	88,00	112,82
Learning and Growth Perspective						104,60
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	86,00	90,72	105,49
		25	Nilai AKIP UPT	77,40	76,92	99,38
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75	83,18	100,52
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00	78,92	105,23
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,75	122,22
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00	89,84	96,60

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing – masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPOM Ambon, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis I pada tahun 2022 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 8. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55	81,89	94,61	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel acak obat (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang dilakukan oleh BPOM di Ambon. Sampel obat yang dimaksud adalah obat yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Dimana sampel obat kategori random/acak yang diperiksa dan diuji sepanjang 2022, Sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan IV tahun 2022 yang **diperoleh adalah sebesar 94,61%** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang efektif**”.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target tahunan 2022

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan tahun 2022 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55	81,89	94,61	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan IV sebesar 81,89% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,55% dengan capaian 94,61% kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang Efektif.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel acak/random yang memenuhi syarat dengan total sampel acak/random yang diperiksa dan diuji Balai sampai dengan Triwulan IV tahun 2022.

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat BPOM di Ambon 81,89% dimana target 86,55%, sehingga diperoleh capaian 94,61% dengan kategori Belum memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif. Dimana capaian Triwulan IV tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian triwulan sebelumnya.

Adapun penyebab peningkatan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Perubahan kebijakan pengambilan keputusan TMK terhadap evaluasi penandaan sampel kosmetik yaitu surat edaran terkait parameter penilaian penandaan yang masuk kategori TMK minor sehingga capaian indikator ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya
- Penambahan kriteria penilaian label menyesuaikan dengan peraturan terbaru namun belum diterapkan seluruhnya oleh pelaku usaha pada komoditi kosmetik, OT, dan SK
- Hasil evaluasi penandaan sampel acak masih menjadi penyumbang terbesar kesimpulan produk TMS, khususnya pada komoditi obat tradisional yang TMK label cukup tinggi
- komoditi obat dan suplemen kesehatan yang masih terdapat temuan TMK label

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK label telah dilaporkan kepada kedeputian dan setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing. Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi yaitu cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga kedepannya dapat mereduksi peredaran produk tersebut.
- Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat quasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat
- Pemenuhan Parameter uji kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber

daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM Ambon berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dalam mendukung penerapan system manajemen mutu laboratorium uji.

- Melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium Balai POM di Ambon.
- Melakukan monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya.
- Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2022.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 10. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan kriteria penilaian label menyesuaikan dengan kondisi terkini yang tidak berkontribusi terhadap jumlah label/penandaan TMK		Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat quasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat	Sepanjang 2023
2	Penyesuaian kriteria kesimpulan penilaian label sebaiknya dilakukan pada awal tahun		Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat quasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat	Sepanjang 2023

IKSS 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 11. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	84,96	93,36	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel makanan yang dilakukan oleh BPOM di Ambon. Sampel makanan yang dimaksud adalah makanan yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Dimana sampel makanan kategori random/acak yang diperiksa dan diuji sepanjang 2022, Sehingga capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan IV tahun 2022 yang **diperoleh adalah sebesar 93,36%** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang efektif**”.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target tahunan 2022

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan tahun 2022 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	84,96	93,36	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Triwulan IV sebesar 84,96% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,00% dengan capaian 93,36% kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel acak/random yang memenuhi syarat dengan total sampel acak/random yang diperiksa dan diuji Balai sampai dengan Triwulan IV tahun 2022.

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Triwulan IV sebesar 84,96% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,00% dengan capaian 93,36% kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang Efektif. Dimana capaian Triwulan IV tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian triwulan sebelumnya.

Adapun penyebab peningkatan/kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Hasil penilaian label pangan acak bulan september seluruhnya MK, sehingga tidak berkontribusi terhadap kesimpulan produk TMK, hal ini sejalan dengan peningkatan capaian indikator dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan penyebab kegagalan mencapai target adalah karena hasil evaluasi penandaan mempengaruhi dalam pengambilan kesimpulan akhir sampel sesuai pada juknis prioritas sampling tahun 2022. Sampel acak dengan hasil penandaan TMK mayor, meski hasil uji MS, maka kesimpulan akhir tetap TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sehingga mempengaruhi persentase capaian pada indikator.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK label telah dilaporkan kepada ke deputian dan setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing. Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi yaitu cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga kedepannya dapat mereduksi peredaran produk tersebut.
- Pemenuhan Parameter uji kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM Ambon berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dalam mendukung penerapan system manajemen mutu laboratorium uji.
- Melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium Balai POM di Ambon.
- Melakukan monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya.
- Pengawasan pelaksanaan penilaian label pangan sesuai dengan juknis yang berlaku.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 13. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan kriteria penilaian label menyesuaikan dengan kondisi terkini yang tidak berkontribusi terhadap jumlah label/penandaan TMK		Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat quasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat	Sepanjang 2023
2	Penyesuaian kriteria kesimpulan penilaian label sebaiknya dilakukan pada awal tahun		Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat quasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat	Sepanjang 2023

IKSS 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

2. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 14. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	73,40	85,35	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel targeted obat (obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang dilakukan oleh BPOM di Ambon. Sampel obat yang dimaksud adalah obat yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Dimana sampel obat kategori targeted yang diperiksa dan diuji sepanjang 2022, Sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan IV tahun 2022 yang **diperoleh adalah sebesar 85,35%** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang efektif**”.

3. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target tahunan 2022

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan tahun 2022 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,00	73,40	85,35	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan IV sebesar 73,40% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,00% dengan capaian 85,35% kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang Efektif.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji Balai sampai dengan Triwulan IV tahun 2022.

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat BPOM di Ambon 73,40% dimana target 86,00%, sehingga diperoleh capaian 85,35% dengan kategori Belum memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif. Dimana capaian Triwulan IV tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian triwulan sebelumnya.

Adapun penyebab peningkatan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Perubahan kebijakan pengambilan keputusan TMK terhadap evaluasi penandaan sampel kosmetik yaitu surat edaran terkait parameter penilaian penandaan yang masuk kategori TMK minor sehingga capaian indikator ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
- Hasil evaluasi penandaan sampel targeted masih menjadi penyumbang terbesar kesimpulan produk TMS, khususnya pada komoditi obat tradisional yang TMK label cukup tinggi
- komoditi obat dan suplemen kesehatan yang masih terdapat temuan TMK label

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK label telah dilaporkan kepada ke deputian dan setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing. Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi yaitu cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga kedepannya dapat mereduksi peredaran produk tersebut.

- Pemenuhan Parameter uji kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM Ambon berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dalam mendukung penerapan system manajemen mutu laboratorium uji.
- Melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium Balai POM di Ambon.
- Melakukan monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya.
- Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2022.

6. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 16. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan kriteria penilaian label menyesuaikan dengan kondisi terkini yang tidak berkontribusi terhadap jumlah label/penandaan TMK		Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat quasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat	Sepanjang 2023
2	Penyesuaian kriteria kesimpulan penilaian label sebaiknya dilakukan pada awal tahun		Pengawasan pelaksanaan penilaian label obat, kosmetik, obat tradisional, obat quasi, dan suplemen kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku, serta peningkatan komunikasi ke pusat	Sepanjang 2023

IKSS 4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 17. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	86,67	98,48	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel makanan yang dilakukan oleh BPOM di Ambon. Sampel makanan yang dimaksud adalah makanan yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan

petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Dimana sampel makanan kategori targeted yang diperiksa dan diuji sepanjang 2022, Sehingga capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan IV tahun 2022 yang **diperoleh adalah sebesar 98,48%** dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang efektif**”.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target tahunan 2022

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan tahun 2022 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,00	75,93	86,28	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Triwulan IV sebesar 80,65 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 88,00% dengan capaian 86,28 % kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji Balai sampai dengan Triwulan IV tahun 2022.

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Triwulan IV sebesar 80,65 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 88,00% dengan capaian 86,28% kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif. Dimana capaian Triwulan IV tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian triwulan sebelumnya.

Adapun penyebab peningkatan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Hasil Pengujian TMS untuk sampel PJAS pada bulan maret masih mempengaruhi perhitungan capaian target.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK label telah dilaporkan kepada ke deputian dan setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing. Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi yaitu cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga kedepannya dapat mereduksi peredaran produk tersebut.

- Pemenuhan Parameter uji kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM Ambon berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dalam mendukung penerapan system manajemen mutu laboratorium uji.
- Melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium Balai POM di Ambon.
- Melakukan monitoring terhadap timeline pengujian dan kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya.
- Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2022.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 19. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan KIE terhadap penjual makanan PJAS.		Usul untuk meningkatkan program dan melaksanakan KIE terhadap penjual makanan PJAS	Sepanjang 2023

IKSS 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 20. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96,00	91,76	95,59	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel pangan fortifikasi yang dilakukan oleh BPOM di Ambon. Sampel pangan fortifikasi yang dimaksud adalah pangan fortifikasi yang disampling oleh BPOM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2022, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium. Dimana sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji sepanjang 2022, Sehingga capaian persentase pangan

fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan IV tahun 2022 yang **diperoleh adalah sebesar 95,59 %** dengan kriteria **"Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang efektif"**.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target tahunan 2022

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan tahun 2022 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96,00	91,76	95,59	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan IV sebesar 91,76% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,00% dengan capaian 95,59% kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji Balai sampai dengan Triwulan IV tahun 2022.

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan IV sebesar 91,76% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,00% dengan capaian 95,59% kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang Efektif. Dimana capaian Triwulan IV tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian triwulan sebelumnya.

Adapun penyebab peningkatan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Masih masih ditemukannya penggunaan garam konsumsi yang belum memenuhi persyaratan SNI fortifikasi yaitu garam konsumsi.
- Maluku tidak memiliki industri / pengemas ulang minyak goreng sawit dan gudang importir tepung terigu sehingga hanya dilakukan sampling pangan fortifikasi di peredaran (100%). Hasil uji pangan fortifikasi tepung terigu, minyak goreng dan garam konsumsi di Maluku masih didominasi dengan hasil memenuhi syarat, dikecualikan untuk garam konsumsi.
- Terdapat peningkatan pengetahuan sarana distribusi terhadap persyaratan pangan fortifikasi.
- Garam konsumsi yang diuji merupakan garam kasar yang dikonsumsi dan diproduksi secara turun temurun di kawasan kepulauan Maluku dimana kesadaran petani garam di Maluku masih rendah terhadap pentingnya fortifikasi KIO3.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk TMK telah dilaporkan kepada ke deputian untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing.
- Pemenuhan Parameter uji kritis (PUK) di laboratorium harus memenuhi metode uji yang dilengkapi oleh peralatan utama, reagen-media, suku cadang, bahan habis pakai, sumber daya/kemampuan uji yang kompeten. BPOM Ambon berkomitmen melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dalam mendukung penerapan system manajemen mutu laboratorium uji.
- Melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium Balai POM di Ambon.
- Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2022.
- Melakukan evaluasi sampling sampel fortifikasi garam, dan di tahun berikutnya tetap sejalan dengan aturan pada juknis Prioritas sampling.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 22. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Telah ditingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.		
2	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi.	Telah dilaksanakan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/ Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi.		

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon

Pencapaian sasaran strategis II pada tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 6. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Interprestasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori yang ditentukan sesuai dengan **Tabel 00**.

Tabel 23. Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

Skor/ Nilai	Kategori
≤ 45,00	Tidak Puas
45,01 – 60,00	Kurang Puas
60,01 – 75,00	Cukup Puas
75,01 – 90,00	Puas
≥ 90,01	Sangat Puas

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

*Tabel 24. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan IV tahun 2022*

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00	76,12	95,15	Belum Memenuhi Ekspektasi / Kurang Efektif

Terdapat 3 (tiga) aspek indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat yaitu:

1. **Pengetahuan (Knowledge)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan, Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat,
2. **Sikap (Attitude)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu, Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengonsumsi obat & makanan yang benar, Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. **Perilaku (Practices)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM. Persetujuan etik penelitian diajukan kepada Komisi Etik Badan Litbangkes Kemenkes RI. Indeks Kesadaran Masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.

Desain metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *multistage random sampling* dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Metode pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dengan cakupan wilayah 34 Provinsi dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis offline dan online.

Hingga Triwulan IV tahun 2022 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Ambon kerana Pelaksanaan pengukuran atas indikator tersebut dilaksanakan diakhir tahun kegiatan dengan target sebesar 80.

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan IV dengan target tahunan 2022

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan tahun 2022 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00	76,12	95,15	Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang Efektif

Penetapan target Indikator Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu adalah tahunan yaitu sebesar 80,00% di mana realisasi TW IV adalah 76,12% sehingga persentase capaian terhadap target adalah sebesar 95,15% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi/kurang efektif.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pengetahuan dan sikap masyarakat dalam kategori Baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku (cukup baik) yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama membaca informasi produk pada Label/Kemasan, contohnya tidak memperhatikan izin edar produk.

Dari hasil survey diketahui bahwa indeks pengetahuan dan sikap masyarakat terkait obat dan makanan aman dan bermutu dalam kategori Baik. Faktor yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator ini antara lain:

- a. Survei Dilakukan Oleh PRKOM dan pihak Ketiga. Metode Sampling dan Responden Tidak Diketahui Sehingga Sulit Dilakukan Intervensi dan Perbaikan

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Pada Triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan pemberian layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan melalui berbagai media, baik secara langsung, media sosial ataupun telepon dan email.
- b. Tayangan berbagai informasi tentang obat dan makanan dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui media elektronik radio dan televisi.
- c. Terlaksananya Program Prioritas Nasional seperti Gerakan Keamanan pangan Desa (GKPD), Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang langsung menyentuh komunitas desa, sekolah dan pasar

- d. Pemanfaatan subsite ambon.pom.go.id, website “Panorama Lain” www.bpomambon.com serta Whatsapp Bisnis di Kontak Layanan 0811-4800-222 yang dilengkapi dengan berbagai katalog informasi obat dan makanan sebagai media KIE kepada masyarakat

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 26. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Ke Depan Agar Dikomunikasikan Metode Sampling, Populasi dan Pertanyaan / Instument Agar Dapat Diselaraskan Dengan Intervensi Kegiatan dan Target Peserta Atau Audience		Meningkatkan kualitas, frekuensi dan cakupan pengawasan hingga ke kabupaten, berkoordinasi dengan PRKOM terhadap aspek penilaian pada instrumen survei sehingga perlu diperbaiki aspek mana yang butuh improvment	Sepanjang 2023

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja Balai POM di Ambon
 Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2022 diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 10. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 27. Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00	100,00	102,04	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dari hasil rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat, dan persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Sehingga capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2022 telah mencapai **102,04 %** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi.”**

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 28. Perbandingan Realisasi keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Kinerja Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022 BPOM Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00	100,00	102,04	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan IV sebesar 100,00% melebihi target yang ditetapkan yaitu 98.00% dengan capaian 102,04% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu **102,04%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspetasi/ Efektif”**. Hasil perhitungan realisasi **100,00%** diperoleh dari rata2 (persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Balai +persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai + persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / Balai persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai di tahun 2021.

Realisasi tersebut dihitung terhadap rekomendasi yang dikirimkan dan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dan atau lintas sektor terkait hingga Triwulan IV tahun 2022. Target indikator kinerja

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga Triwulan IV konsisten dapat.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini adalah :

- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontinyu
- b. Memonitor SIPT pemeriksaan terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing direktorat
- c. Merencanakan kegiatan pemeriksaan pada tahun 2022 yang tindak lanjutnya berupa rekomendasi ke Badan POM sehingga tidak menumpuk di akhir tahun
- d. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 29 Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan komunikasi dengan Badan POM terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Ambon yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.	Balai POM di Ambon sudah melakukan komunikasi dengan Badan POM terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Ambon yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.		
2	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi dengan kombinasi antara lain menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan protokol Kesehatan dan analisa resiko sarana.	Untuk bisa melaksanakan rekomendasi dari Pusat maupun rekomendasi dari pemangku kepentingan Balai POM di Ambon tetap melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi dengan kombinasi antara lain menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan protokol Kesehatan dan analisa resiko sarana.		

IKSS 11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Wilayah Kerja BPOM Ambon

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada Triwulan IV tahun 2022 Balai POM di Ambon telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait dan sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan **telah berhasil mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 112,95% dengan **Kategori “Memenuhi Ekspetasi/ Efisien”**.

1. Perbandingan target dan relaisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 30. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	74,55	112,95	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dari hasil rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat, dan persentase

rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Sehingga capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2022 **telah mencapai 112,95%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspetasi/ Efektif.”**

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022 BPOM Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	74,55	112,95	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan IV sebesar 74,55% melebihi target yang ditetapkan yaitu 66.00% dengan capaian 112,95% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu 105,39% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspetasi/ Efisien”**. Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah sebagai berikut :

- Pelaku usaha sudah patuh mengikuti instruksi untuk dapat merespon surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Balai POM Ambon dengan perbaikan – perbaikan berdasarkan temuan yang ada.
- Pengetahuan pelaku usaha untuk merespon surat tindak lanjut sangat baik
- Respon/tindak lanjut dari lintas sektor terhadap surat dari Balai POM Ambon sudah cukup memadai.
- Beberapa sarana distribusi tidak memiliki alamat yang jelas sehingga surat tindak lanjut yang telah dikirimkan oleh petugas tidak diterima oleh pelaku usaha atau penolakan oleh sarana kepada petugas jasa pengiriman ketika diserahkan surat tindak lanjut. Namun hal ini sudah dapat diatasi dengan penyampaian tindak rekomendasi secara whatsapp.
- Penggunaan aplikasi SMART POM belum optimal dalam monitoring pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah.

- Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas BPOM di Ambon.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini adalah :

- Mengintensifkan monitoring/follow up terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti
- Monitoring dan evaluasi dilakukan secara kontinyu
- Memonitor SIPT pemeriksaan terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing direktorat
- Merencanakan kegiatan pemeriksaan pada tahun 2022 yang tindak lanjutnya berupa rekomendasi ke Badan POM sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 32. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan feedback / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Ambon.	Balai POM di Ambon sudah melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan feedback / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Ambon.		
2	Meningkatkan target persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sector pada Triwulan IV tahun 2022	Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Ambon dan meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Ambon ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback		

		dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten		
--	--	--	--	--

IKSS 12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - 4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - 5) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - 6) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
 - 7) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - 8) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel *early warning system*)
- Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

6. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 33 Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Sehingga capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan IV tahun 2022 **telah mencapai 102,04%** dengan kategori “**Memenuhi Ekspektasi/ Efisien**”.

7. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 34. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan IV Tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	100,00	102,04	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan IV sebesar 100,00 melebihi target yang ditetapkan yaitu 98.00% dengan capaian 102,04 % dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi / Efektif**”.

8. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Mikro Obat tradisional, Industri pangan, dan Industri rumah tangga pangan. Capaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu 102,04% (capaian penyesuaian 102,04%) dengan kategori “**Memenuhi Ekspektasi/ Efisien**”.

Capaian indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 102,04% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi/ Efisien**”. Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja ini adalah :

- Pelaku usaha dan sarana yang melakukan pengajuan audit sertifikasi berkomitmen dengan baik sehingga persiapannya berjalan lancar dan audit dapat berlangsung tepat waktu.
- Bimbingan dan pembinaan yang intensif
- Namun masih adanya pelaku usaha dalam penilaian sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB /yang belum melakukan perbaikan CAPA dengan baik.
- Terdapat 2 sertifikat pengujian sampel yang tidak tepat waktu, dikarenakan antri alat akibat beban kerja yang tinggi pada saat itu.

- Program inovasi UMKM Jumping turut membantu meningkatkan persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu karena telah dilaksanakan penjangkaran dan pendampingan UMKM dengan baik dalam proses sertifikasi.

9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini:

- Selalu melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan timeline pada bulan berjalan. Misalnya untuk pengujian waktu masuk sampel disesuaikan dengan ritme/ flow sampel atau beban bulan berjalan.
- Peningkatan layanan publik yang terintegrasi sehingga memudahkan informasi dan prosedur bagi penerima layanan.
- Membuka forum diskusi melalui pertemuan dengan lintas sektor terkait maupun pelaku usaha
- Secara berkala melakukan pengecekan terhadap sistem e-sertifikasi.pom.go.id terkait pengajuan sertifikasi CPOTB sehingga jika ada pengajuan akan dapat langsung ditindaklanjuti.
- Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang belum siap diaudit sejak awal tahun 2022 dan menjadi mitra yang baik untuk konsultasi serta memberi masukan saat ada kesulitan/hambatan dari pelaku usaha tersebut
- Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan feedback CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
- Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM dengan layanan konsultasi yang intensif secara langsung maupun tidak langsung.
- Melaksanakan pemeriksaan daring maupun luring dengan waktu yang efektif namun tetap komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat risiko produk yang didaftarkan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Tindak lanjut hasil evaluasi akan tetap dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait Cara Produksi yang Baik
- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) harus tetap dilaksanakan secara berkala, sehingga memudahkan koordinasi dengan lintas sektor yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, dan DPMPTSP di Provinsi Maluku. Kegiatan ini diharapkan akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai karena sudah terjadi upaya sinkronisasi kinerja antar lintas sektor sehingga pengawasan obat dan makanan di Maluku lebih intensif dan komprehensif.

- Pelaku usaha sudah mendapat pendampingan/binaan dari regulator terkait aspek cara produksi yang baik dan implementasinya
- Pada tahun 2022 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

10. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 35. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Intensifikasi desk CAPA		Peningkatan bimbingan dan pembinaan serta desk hasil pembinaan	Sepanjang 2023
2	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya di layanan publik		Peningkatan kapaitas dan kapabilitas sumber daya pelayanan publik	Sepanjang 2023
3	Perjelas tugas dan tanggungjawab linsek terkait dan komitmen pelaku usaha		Advokasi dengan pemangku kepentingan terkait	Sepanjang 2023

IKSS 13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

2. Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene major.

3. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

4. Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

- Sarana Produksi Pangan
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:
 - a. Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
 - b. Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 36. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	78,49	109,02	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%
Sehingga capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan IV tahun 2022 **telah mencapai 109,02%** dengan kategori **“Memenuhi Ekspektasi/ Efisien”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 37. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	78,49	109,02	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 78,49% melebihi target yang ditetapkan yaitu 72.00% dengan capaian 109,02% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Mikro Obat tradisional, Industri pangan, dan Industri rumah tangga pangan. Capaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu 109,02% (capaian penyesuaian 109,02%) dengan kategori **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Tindak lanjut hasil evaluasi akan tetap dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait Cara Produksi yang Baik
- b. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) harus tetap dilaksanakan secara berkala, sehingga memudahkan koordinasi dengan lintas sektor yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, dan DPMPTSP di Provinsi Maluku. Kegiatan ini diharapkan akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai karena sudah terjadi upaya sinkronisasi kinerja antar lintas sektor sehingga pengawasan obat dan makanan di Maluku lebih intensif dan komprehensif.
- c. Pelaku usaha sudah mendapat pendampingan/binaan dari regulator terkait aspek cara produksi yang baik dan implementasinya
- d. Pada Triwulan IV tahun 2022 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan di bidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan di lapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 38. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Evaluasi dan monitoring secara periodik	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu dan periodik		

IKSS 14. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - b. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - c. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 39. Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,01	100,01	Memenuhi Ekspektasi/Efektif

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut : Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%.

Sehingga capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan IV tahun 2022 **telah mencapai 100,01%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efisien”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 40. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,01	100,01	Memenuhi Ekspektasi/Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 76,01 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 76.00% dengan capaian 100,01% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Belum Efektif”**.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa di Kawasan wilayah Balai POM Ambon adalah sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan capaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah :

- Pada Triwulan IV tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat (PBF, IF Kab/Kota, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Toko Obat). Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 76,01% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 76.00% dengan capaian 100,01% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**. Hal ini disebabkan karena penetapan sarana pemeriksaan sarana distribusi obat telah menggunakan analisis resiko, dimana sarana dengan analisis resiko tertinggi yang akan diperiksa. Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku ijin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat beberapa audit komprehensif dari PBF ke apotek dan diperoleh hasil apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan.
- Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada Triwulan IV tahun 2022 BPOM di Ambon juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan. Masih ditemukan adanya ketidakpatuhan pelaku usaha dengan masih ditemukan produk tanpa ijin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target persentase distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah :

- Kehadiran Tenaga kefarmasian di apotek sudah cukup baik sehingga dapat mengontrol pelayanan kefarmasian di apotek
- Tenaga kefarmasian di apotek sudah sepenuhnya patuh pada peraturan yang ada terkait pelayanan kefarmasian sehingga praktek pelayanan sesuai dengan yang dipersyaratkan
- Pelaku usaha distribusi pangan, sebagian besar sudah paham dan peduli terkait ijin edar produk, sehingga penemuan produk tanpa ijin edar (TIE) sudah sedikit.

- Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait terhadap sarana pelayanan kefarmasian tergolong sudah optimal
- Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aturan Cara Distribusi yang Baik sudah cukup memadai sehingga mereka mampu membantu menjaga mutu produk yang dijual

Dikarenakan terjadinya pandemic Covid 19, pada Triwulan IV tahun 2022 terjadi penurunan target sarana distribusi obat dan makanan. Penurunan target ini juga menyebabkan terjadinya penyesuaian cara pemeriksaan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, dimana untuk sarana dengan risiko tinggi (*high risk*) terjadinya penularan covid 19 (rumah sakit, puskesmas, klinik), maka pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (*online inspection*). Pada awal terjadinya pandemic (Maret-April), pemeriksaan sarana dilakukan secara *online inspection* saja dan menyebabkan penurunan capaian sarana. Oleh karena itu mulai bulan Mei-Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan secara onsite ke sarana yang memiliki tingkat penularan covid 19 *low-medium risk*. Pemeriksaan sarana secara onsite memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dikarenakan pada saat pemeriksaan langsung kesarana, kita dapat melihat langsung kondisi riil di sarana dan dapat memperoleh ketidaksesuaian yang lebih banyak. Pelaksanaan pemeriksaan secara onsite tetap memperhatikan protokol kesehatan dan penjadwalan sistem tugas yang diatur sedemikian rupa sehingga petugas tidak terlalu lelah.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indicator ini adalah :

- a. Memberikan pembinaan dan pendampingan intensif saat pemeriksaan dan saat penyerahan CAPA terhadap pelaku usaha apotek dan tenaga kefarmasiannya untuk mematuhi peraturan pelayanan kefarmasian di apotek dari mulai aspek pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyerahan, pelaporan dan dokumentasi.
- b. Kolaborasi pengawasan yang dilakukan serta komitmen tindak lanjut hasil pengawasan bersama pemangku kepentingan
- c. Bimtek pengelolaan ONPP sesuai SPK dan Desk CAPA secara kontinyu
- d. KIE keamanan dan mutu obat dan makanan dilakukan dengan menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang belum terpapar.
- e. Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via whatsapp/email untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi/ketentuan dalam peredaran obat dan makanan

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 41. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Bimtek pengelolaan ONPP sesuai SPK dan Desk CAPA secara kontinyu		Bimbingan Teknis dengan focus tertentu (pada hal-hal yang belum sesuai)	Sepanjang 2023
2	KIE keamanan dan mutu obat dan makanan dilakukan dengan menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang belum terpapar		KIE	Sepanjang 2023
3	Konsisten movev dengan stakeholder terkait		Advokasi isu2 terkini terkait pengawasan obat dan makanan	Sepanjang 2023
4	Komitmen bersama terus ditingkatkan		Peningkatan kolaborasi	Sepanjang 2023

IKSS 15. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah :

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - a) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

1. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
2. Untuk UMKM OT :
 - a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - c) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - d) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
3. Untuk UMKM Kosmetik:
 - a) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - b) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan enotifikasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Tabel 42. Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	97,78	126,99	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan diatas, Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan IV tahun 2022 sebesar **126,99** dengan kategori **“Tidak dapat disimpulkan”**. Nilai tersebut **melampaui target** tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,78%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan IV Tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 43. Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Triwulan IV Tahun 2022 dengan Target Tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	97,78	126,99	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 97,78% melebihi target yang ditetapkan yaitu 77.00% dengan capaian 126,99% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan.”

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Hingga akhir Triwulan IV tahun 2022, telah melakukan tahapan-tahapan pendampingan UMKM pangan olahan dan obat tradisional dengan capaian 126,99% berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Terjadi Perubahan Metode Penilaian UPP. Hasil Penilaian Yang Telah Didesk dan Disetujui Ternyata Berbeda Dengan Hasil yang Dituangkan Pada Berita Acara.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pendampingan UMKM ini antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota yang terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi) terkait dengan program-program pendampingan UMKM yang juga dimiliki oleh Dinas Kab/Kota termasuk dengan rumah BUMN yang juga mempunyai program pendampingan terhadap UMKM di Maluku

2. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pendampingan UMKM

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendampingan UMKM ini antaranya adalah banyaknya program-program dari lintas sektor terkait dengan pendampingan umkm sehingga saat akan melaksanakan pendampingan di sarana produksi agak terhambat, NIB dan NPWP yang dimiliki oleh pelaku usaha belum terintegrasi dengan OSS sehingga saat akan melakukan permohonan sertifikat izin penerapan CPPOB tidak bisa dilanjutkan. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha, komunikasi dan koordinasi dengan Dinas PTSP, kantor pajak dan juga berkonsultasi langsung ke direktorat terkait di Badan POM.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 44. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan Komunikasi Agar Biro Hukmas Memberikan Informasi Terlebih Dahulu Sebelum		Melakukan perbaikan terhadap aspek penilaian yang belum optimal dan menyesuaikan dengan metode penilaian terbaru	Juli 2023

Menuangkan Hasil IPP Pada Berita Acara			
---	--	--	--

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon
 Pada Triwulan IV Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan

Pencapaian sasaran strategis V pada Triwulan IV tahun 2022 diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 16. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di definisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Bobot indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan ditetapkan seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 45. Bobot Indikator Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No.	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM.

Kategori penilaian yang digunakan mulai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 46. Interpretasi Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	93,76	98,28	Belum Memenuhi Ekspektasi / Belum Efektif

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan IV tahun 2022 sebesar **93,76 tidak mencapai target** yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,40. Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan **“Belum Memenuhi Ekspektasi /Belum Efektif”**. Atas perolehan nilai tersebut, capaian indikator pelayanan publik sebesar **98,28%** dengan kategori **“Belum Memenuhi Ekspektasi/Belum Efektif”**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 48. Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Triwulan IV Tahun 2022 dengan target Tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	93,76	98,28	Belum Memenuhi Ekspektasi/Belum Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 93,76% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 95,40% dengan capaian 98,28% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi/Belum Efektif”**.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu

- Baseline Data Target Sangat Tinggi. Aspek Pertanyaan Pada Kuesioner KIE Tidak Diketahui Secara Langsung Dengan Aspek Penilaian. Pengisian Kuesioner Juga Secara Online Oleh Responden KIE. Sulit Dilakukan Intervensi Terhadap Pertanyaan Aspek yang Memiliki Nilai Rendah.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Berikut program dan kegiatan yang telah dilakukan BPOM Ambon yang menunjang pencapaian kinerja ini:

- Optimalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama Lain (papan Informasi Obat dan Makanan Online) sebagai media informasi dan publikasi.
- KIE obat dan makanan melalui media elektronik seperti radio dan televisi untuk menjangkau masyarakat di luar daerah ibu kota provinsi.
- KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instgram, facebook, youtube, salah satunya dengan Inovasi program AoC Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu Sharing Pengalaman dan Pengetahuan).
- KIE kepada berbagai komunitas masyarakat seperti kader keamanan pangan desa, kader pangan sekolah, UMKM, pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan Saka POM.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 49. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Agar Dilakukan Komunikasi Dengan Inspektorat Terkait Pertanyaan dan Aspek Pada Kuesioner Agar Dapat Dilakukan Intervensi Dengan Jelas		Perbaiki aspek yang belum optimal dan berkoordinasi dengan PJ Efektivitas KIE terkait Aspek pada penilaian	Juli 2023

IKSS 17. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan intervensi keamanan PJAS yaitu (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, (3) Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, (4) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan (5) Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56	56	100,00	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Sesuai dengan tabel di atas, target yang ditetapkan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **telah berhasil mencapai target** dengan persentase capaian kinerja **100%** kriteria “**Memenuhi Ekspektasi /Efektif**”.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2021 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 51. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan IV Tahun 2022 dengan Target Tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56,00	56	100,00	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 56 melebihi target yang ditetapkan yaitu 56 Sarana dengan capaian 100,00 % dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi/Efektif**”.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu

1. Pro-PN PJAS Telah Dilaksanakan Sesuai Juknis. Walaupun tercapai target output dan outcome, hanya kendala di Provinsi Maluku terkait cuaca dan gelombang laut untuk menjangkau lokus stunting tersebut. Selain itu kantin sekolah juga belum aktif pasca pandemi covid-19 dan jadwal ujian atau pun libur sekolah
2. Komitmen yang tinggi dari kepala sekolah beserta jajarannya setelah dilakukan audiensi dan advokasi PJAS
3. Peran serta lintas sektor yang mendukung penuh program Intervensi Keamanan PJAS

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program Intervensi Keamanan PJAS
2. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan
3. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan

5. Sertifikasi Level I Keamanan Pangan Sekolah mulai dari intervensi audit sarana dan prasarana kantin sekolah, *self assessment* yang dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah dan diverifikasi oleh petugas BPOM di Ambon terlaksana

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 52. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Program Dilaksanakan dengan Memperhatikan Cuaca, Gelombang Laut (Info BMKG) dan Kalender Akademik Pendidikan	Sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi sebelumnya		

IKSS 18. Jumlah desa pangan aman

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Tahapan program desa pangan aman yaitu (1) Advokasi Kelembagaan Desa, (2) Pengadaan gimmick, rapid test kit, (3) Pengawasan Desa, (4) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), (5) Bimtek Komunitas Desa, (6) Fasilitasi Keamanan Pangan, (7) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, (8) Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), dan (9) Lomba Desa Pangan Aman

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Tahun Triwulan IV Tahun 2022, seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi.

Tabel 53. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah desa pangan aman	18,00	18,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Sesuai dengan tabel di atas, realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan IV tahun 2022 mencapai target, maka persentase capaian realisasi kinerjanya mencapai 100,00% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi / Efektif”**

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan IV Tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan IV Tahun 2022 dengan Target Tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah desa pangan aman	18,00	18,00	100	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 18 melebihi target yang ditetapkan yaitu 18 Desa dengan capaian 100% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu

1. Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang melibatkan banyak orang dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan
2. Komitmen yang tinggi dari Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya setelah dilakukan audiensi dan advokasi kelembagaan desa

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa menghadirkan instansi lintas sektor terkait dan perangkat desa

2. Terlaksananya seluruh kegiatan pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa, Fasilitasi I dan II, Intensifikasi pengawasan keamanan pangan, Pengawasan desa terintervensi tahun sebelumnya dan yang terakhir Monitoring dan Evaluasi.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 55. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Program Dilaksanakan dengan Memperhatikan Cuaca, Gelombang Laut (Info BMKG). Program diprioritaskan pada Desa Lokus Stunting untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting di Maluku	Sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi sebelumnya		

IKSS 19. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan pasar aman dari bahan berbahaya yaitu : (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Pelatihan Petugas Pasar, (3) Penyuluhan Komunitas Pasar, (4) Monitoring dan Evaluasi dan (5) Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 56. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	6	100,00	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Sesuai tabel di atas, realisasi jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya pada Triwulan IV tahun 2022 melebihi target. Persentase realisasi capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **telah berhasil mencapai target** yaitu 100,00% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi/Efektif**”.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
Tahun Triwulan IV Tahun 2022 dengan Target Tahunan 2022

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	6,00	100	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 6 pasar melebihi target yang ditetapkan yaitu 6 pasar dengan capaian 100,00% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi/Efektif**”.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Mengubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Namun demikian, BPOM di Surabaya telah berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar Aman Bahan Berbahaya.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Tahapan kegiatan Pasar Aman yang sudah dilaksanakan hingga TW IV meliputi survei pasar, bimbingan teknis bagi pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap I dan tahap II, penyuluhan dan kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya bagi komunitas pasar

2. Tahapan kegiatan Pasar Aman yang bisa dilaksanakan pada TW IV meliputi monitoring dan evaluasi di Pasar
3. Pro-PN PABB Telah Dilaksanakan Sesuai Juknis. Walaupun tercapai target output dan outcome, hanya kendala di Provinsi Maluku terkait cuaca dan gelombang laut untuk menjangkau lokus stunting tersebut.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 58. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Program Dilaksanakan dengan Memperhatikan Cuaca, Gelombang Laut (Info BMKG)	Sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi sebelumnya		

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Pada Triwulan IV Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Pencapaian sasaran strategis VI pada Triwulan IV tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 20. Persentase Sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

- a. Sampel Obat meliputi sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik.
- b. Sesuai standar adalah pengujian sesuai standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar} + \text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}) / (\text{Jumlah target sampel obat yang diperiksa} + \text{Jumlah target sampel obat yang diuji}) \times 100\%$

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 59. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	98,19	98,19	Belum Memenuhi Ekspetasi/ Belum Efektif

Jumlah sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM Ambon dibagi dengan Jumlah target sampel obat yang diperiksa + Jumlah target sampel obat yang diuji di Balai POM Ambon. Sehingga capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan IV tahun 2022 **mencapai 98,19%** dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspetasi/Belum Efektif”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dengan target tahunan 2022 BPOM Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard	100,00	98,19	98,19	Belum Memenuhi Ekspetasi/ Belum Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 98,19% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 100.00% dengan capaian 98,19% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspetasi/Belum Efektif.”**

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BPOM di Ambon 100.00% dimana target 98,19%, sehingga diperoleh capaian 98,19% dengan kategori Belum Memenuhi Ekspetasi/Belum Efektif.

- Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar sudah dilakukan secara keseluruhan.

- Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar (sesuai Parameter uji kritis PUK dan timeline)

Untuk itu diperlukan :

- Koordinasi yang baik antara laboratorium uji BPOM Ambon dengan laboraorium PJ regionalisasi dan laboratorium uji spesifik untuk pengujian sampel parameter regionalisasi.
- Kebutuhan akan jumlah dan perawatan HPLC dan GC agar tidak terkedala ketika flow sampel yang tinggi, perlu perencanaan, monitoring, tindak lanjut yang baik
- Lebih intensif dalam monitoring penanganan flow sampel agar tidak menumpuk di akhir tahun.
- Diperlukannya dukungan penuh dari tersedianya sarana dan prasarana, peralatan/ pendukung, metoda, regaen/media, kemampuan uji (pelatihan teknis pengujian) dalam mencapai target pemeriksaan dan pengujian.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah:

- Persentase obat yang dimaksud terdiri dari beberapa komoditi yaitu obat, kosmetik, OT, SK, dan obat kuasi, sehingga untuk mengendalikannya membutuhkan beberapa strategi Melakukan rapat evaluasi sampling terjadwal setiap bulan berjalan dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian.
- Kegiatan peningkatan kompetensi dan kapabilitas petugas sampling dan pengujian diantaranya Pertemuan teknis Regionalisasi, Pelatihan pengenalan dan penggunaan GC-MS, Pelatihan Analisa menggunakan instrument (PK logam Pb dalam yoghurt secara AAS), Pelatihan JMHP, Pelatihan ARIS : Sampling and Analysis of Nutmeg, serta pendampingan pengujian terhadap PFM yang lebih rendah kompetensinya.
- Sistem regionalisasi memberikan resiko menambah waktu pada proses pengiriman sampel (waktu ekspedisi), dan komitmen pelaporan dari masing2 balai penguji dalam 1 region yang perlu ditingkatkan, sehingga tidak saling menunggu hasil uji. Menyamakan waktu bulan sampling, saat sampel masuk memang sesuai dengan bulan renlak uji utk sampel tersebut, sehingga tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh balai penguji. Sampel Obat : kategori sampel dari regionalisasi, yang masuk laboratorium sangat bervariasi, dimana metode uji utk komoditi obat berbeda2, sehingga terjadi penumpukan sampel dari bulan sebelumnya.

- Menyusun dan mengevaluasi parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai yang telah ditetapkan BPOM Ambon secara berkala(dijadikan target SKP personil laboratorium).
- Konsisten dalam melakukan pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label sebagai langkah awal sampling sebelum lanjut ke pengujian

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 61. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyampaikan kendala dan hambatan pada monitoring dan evaluasi regionalisasi Region 6 yang diselenggarakan di Manado	Telah disampaikan pada forum monev Regionalisasi terkait hal-hal yang menjadi kendala teknis, dan sudah dibuat langkah-langkah yang disepakati oleh seluruh region		
2	Meningkatkan komunikasi efektif dalam satu region 6, jika ada kendala teknis segera didiskusikan dalam forum grup wa, dan komitmen dalam mengisi pelaporan melalui bitly yang dibuat, dan aktif berkomunikasi jika ada pelaporan sipt yang tersangkut.	Kendala teknis sudah disampaikan pada saat monev regionalisasi, komunikasi dalam region semakin efektif setelah pertemuan monev regionalisasi yang diselenggarakan di Manado.		

IKSS 21. Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

- Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah $(\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} + \text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}) / (\text{Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa} + \text{Jumlah target sampel makanan yang diuji}) \times 100\%$

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 62. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspetasi/ Efektif

Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar di Balai POM Ambon dibagi dengan Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel Makanan yang diuji di Balai POM Ambon. Sehingga capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan IV tahun 2022 **telah mencapai 100,00%** dengan kriteria **“Memenuhi Ekspetasi/Efektif”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian Triwulan IV tahun 2022 dengan target tahunan 2022

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dengan target tahunan 2022 BPOM Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspetasi/ Efektif

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan IV sebesar 93,81 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 100.00% dengan capaian 93,81% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi/Efektif”**.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BPOM di Ambon 100,00% dimana target 100,00%, sehingga diperoleh capaian 100,00% dengan kategori Memenuhi Ekspetasi/Efektif.

Keberhasilan pencapaian pada Triwulan IV tahun 2022 ini disebabkan oleh:

- Monitoring (penanganan flow) sampel dan evaluasi berkala yang baik dalam sampling, pengujian dan pelaporan yang baik, baik untuk sampel internal dan eksternal. Monitoring jg

dilakukan terhadap sampel eksternal (DAK) dan swasta agar seluruh target waktu penyelesaian tercapai.

- Dukungan dari tersedianya sarana dan prasarana (peralatan/ pendukung, metoda dan kemampuan uji, reagen/media) dalam mencapai target pemeriksaan dan pengujian sangat diperhatikan oleh pimpinan.

Dalam penanganan sampel untuk jenis dan parameter yang sama dilakukan oleh beberapa orang agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki oleh tim kecil tersebut.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah:

- Melakukan rapat evaluasi sampling terjadwal setiap bulan berjalan dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian.
- Adanya sistem regionalisasi sangat membantu dalam berkomunikasi antar balai seregional maupun antar region, jika teridentifikasi faktor-faktor penghambat teknis pengujian. Sehingga dapat meminimalisir resiko target tidak tercapai.
- Hambatan dari pengujian antara lain adalah kendala teknis terkait instrumen yang rusak (KCKT, Elisa, PCR, AAS) ketersediaan baku dan reagen, dan alat pendukung lab lainnya (detektor, dll) pada laboratorium dapat mempengaruhi parameter uji kritis dan time line sampel yang diuji oleh Balai POM Ambon
- Kegiatan peningkatan kompetensi dan kapabilitas petugas sampling dan pengujian diantaranya Pertemuan teknis Regionalisasi, Pelatihan pengenalan dan penggunaan GC-MS, Pelatihan Analisa menggunakan instrument (PK logam Pb dalam yoghurt secara AAS), Pelatihan JMHP, Pelatihan ARIS : Sampling and Analysis of Nutmeg, serta pendampingan pengujian terhadap PFM yang lebih rendah kompetensinya.
- Mengupayakan Bimtek/zoom webinar dari supplier alat, melakukan pemeliharaan alat, pengadaan reagen media suku cadang yang urgent, diskusi dengan PPPOMN dan pihak akademisi dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengujian.
- Menyusun dan mengevaluasi parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai yang telah ditetapkan BPOM Ambon secara berkala.

6. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 64. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membangun komunikasi efektif dengan laboratorim satu region, apabila teridentifikasi resiko kendala teknis, pada proses uji	Sudah melaksanakan komunikasi aktif dalam satu region, mengisi bitly kendala untuk membuat daftar faktor resiko yang menjadi penghambat teknis.		

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pada Triwulan IV Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan dengan NPS 112,82% (Memenuhi Ekspetasi)

Pencapaian sasaran strategis VII pada Triwulan IV Tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 22. Persentase keberhasilan penindakan di bidang obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon

Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Ambon diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap II sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya).
Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun dan perkara carry over.

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 65. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Triwulan IV tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	88,00	112,82	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Ambon dengan capaian 112,82% dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”**

2. Perbandingan realisasi Triwulan IV terhadap target tahun 2022

Tabel 66. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV dengan tahun 2022 BPOM di Ambon

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	88,00	112,82	Memenuhi Ekspektasi

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BPOM di Ambon Yang Optimal

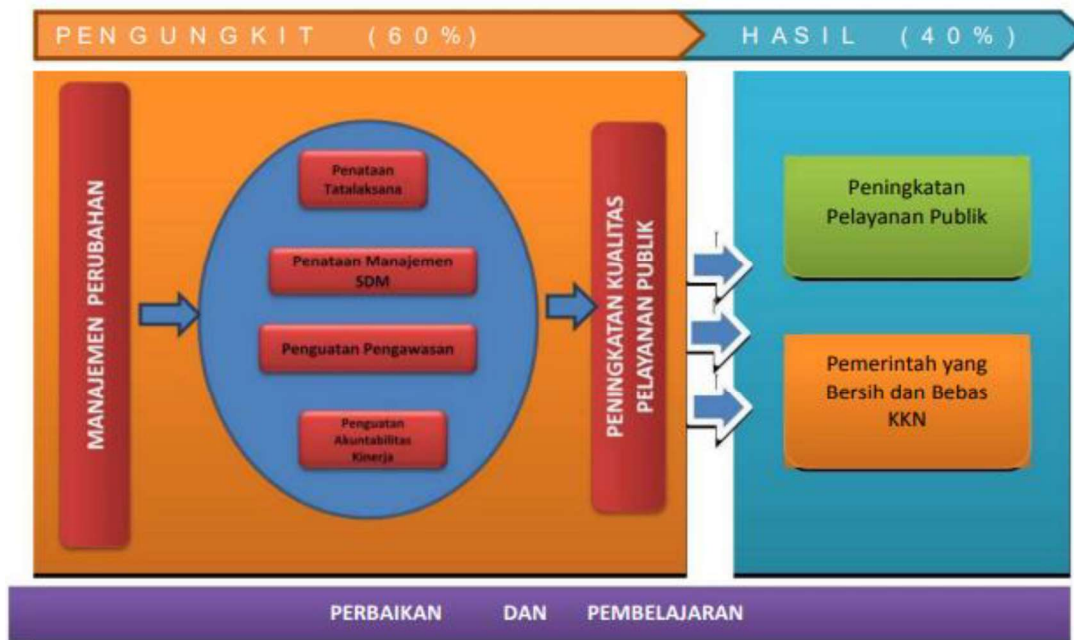
Pencapaian sasaran strategis VIV pada tahun Triwulan IV Tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 23. Indeks RB UPT

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan utama dari Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dijelaskan bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM adalah Inspektorat Utama.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah **gambar 27** yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Gambar 27. Komponen pengungkit dan komponen hasil reformasi birokrasi

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel 67. Komponen pengungkit reformasi birokrasi

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Komponen hasil merupakan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi yang tertuju pada dua sasaran utama yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen hasil penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel 68. Komponen Hasil reformasi birokrasi

NO	UNSUR KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

3. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2022

Tabel 69. Realisasi Indeks RB Balai POM di Ambon

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks RB UPT	86,00	90,72	105,49	Memenuhi Ekspektasi

Penetapan target Indeks RB adalah tahunan dengan target sebesar 86,00 dimana Balai POM di Ambon mendapat nilai Indeks RB sebesar 90,72% sehingga nilai capaiannya menjadi 105,49% dengan kategori **“Memenuhi Ekspektasi”**

4. Perbandingan Realisasi Triwulan IV terhadap target Tahun 2024

Tabel 70. Indeks RB Balai POM di Ambon Triwulan 4 Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks RB UPT	86	90,72	105,49	Memenuhi Ekspektasi

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2022 BPOM di Ambon telah dinilai oleh TPI Badan POM dan juga KemenPANRB, akan tetapi belum berhasil mencapai nilai yang ditargetkan untuk meraih predikat WBK/WBBM. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya perbedaan hasil penilaian TPI Badan POM dengan hasil penilaian KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit hasil penilaian TPI perlu dikonversikan dengan hasil penilaian oleh KemenPANRB. Dimana realisasi BPOM Ambon adalah 83.21 dimana capaiannya 99,65% (kategori baik).

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung meraih predikat WBK/WBBM dari BPOM di Ambon antara lain dengan melakukan sosialisasi RB secara online di media Whats App grup kantor, media sosial Instagram dan media sosial lainnya mengenai peningkatan pelayanan publik, evaluasi

internal setiap bulan, pemberian penghargaan kinerja pegawai maupun pelayan publik, sosialisasi gratifikasi, serta respon cepat terhadap pertanyaan masyarakat di media online.

Terdapat juga inovasi-inovasi yang dibuat dan digunakan untuk mendukung proses pelayanan public baik internal maupun eksternal, seperti Program inovasi QUICK RESPONSE (QR) DATA memudahkan pengarsipan dan pengaksesan secara digital di lingkup Balai POM Ambon Program inovasi Si PANDAN (Slap Hadapi Pandemi dengan Kegiatan Online), merupakan terobosan Inovasi BPOM Ambon untuk merespon masa pandemic COVID 19 agar kegiatan tetap berjalan dengan baik, yaitu berupa Bimtek Virtual, KIE via Online, Informasi Layanan Masyarakat via Media Elektronik, Inspeksi Sarana Virtual dan Cyber Patrol. Selain itu juga terdapat beberapa program AOC (*Agent of Change*) yang mendukung unit kerja guna meningkatkan kualitas kinerja dalam melakukan pelayanan publik.

1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adanya komitmen yang tinggi mulai dari pimpinan unit kerja hingga seluruh pegawai untuk meraih WBK/WBBM, pada tahun 2022 telah di buat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung unit kerja BPOM Ambon meraih WBK/WBBM, akan tetapi dikarenakan beberapa hal termasuk pandemic covid yang masih berlangsung, maka beberapa kegiatan dan inovasi yang telah dibuat kurang berjalan maksimal. Maka dairpada itu, BPOM di Ambon terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan menginisiasi ataupun melakukan monitoring evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang ada untuk menyesuaikan dengan suatu kondisi khususnya pandemic covid yang masih berlangsung. Inovasi-inovasi yang sudah berjalan akan terus dikembangkan sehingga kebermanfaatannya bagi pegawai maupun masyarakat khususnya di Provinsi Maluku dapat dirasakan, yang pada akhirnya BPOM di Ambon akan dapat meraih WBK/WBBM

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan penilaian RB tahun 2022, maka BPOM di Ambon akan melakukan upaya peningkatan guna meraih WBK/WBBM berupa:

1. Membuat pelatihan ataupun workshop bagi seluruh pegawai dalam hal reformasi birokrasi guna lebih meningkatkan komitmen dalam meraih WBK/WBBM untuk BPOM di Ambon
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi pada 6 area perubahan, sehingga lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik

3. Memperbaiki laporan kinerja dalam hal penyajian informasi kinerja sehingga data yang diperoleh dan diolah lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, baik itu bulanan, triwulan, maupun semesteran dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan
5. Melakukan survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi secara berkala yang dilakukan oleh pegawai ataupun masyarakat sebagai mitra dalam mendukung reformasi birokrasi pada wilayah kerja BPOM di Ambon
6. Mengkomunikasikan setiap perubahan kepada masyarakat melalui manajemen media secara optimal, khususnya pada media sosial maupun media cetak
7. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi yang sudah berjalan maupun melalui sikap komitmen siap melayani dari pegawai BPOM di Ambon

IKSS 24. Nilai AKIP Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BPOM Ambon, dengan kategori penilaian :

Tabel 71. Kriteria Penilaian AKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Table 72. Nilai AKIP Balai POM di Ambon

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Nilai AKIP UPT	77,40	76,92	99,38	Memenuhi Ekspektasi

Periode penetapan target Nilai AKIP adalah tahunan dengan target Tahun 2022 sebesar 77,40 dimana Balai POM di Ambon memperoleh nilai Indeks AKIP sebesar 76,92% dengan kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”

2. Perbandingan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2024

Tabel 73. Nilai AKIP BPOM di Ambon
Triwulan IV Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Nilai AKIP UPT	79,40	76,92	99,38	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penetapan target Indikator Nilai AKIP akhir periode Renstra 2020-2024 adalah sebesar 79,40% dimana Balai POM di Ambon memperoleh nilai AKIP sebesar 76,92% sehingga capaian menjadi 99,38% dengan kategori “**Belum Memenuhi Ekspektasi.**”

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terhadap beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan rekomendasi dari APIP terhadap implementasi SAKIP BPOM di Ambon maka dilakukan:

- ✓ Dalam perencanaan (Mengesahkan dokumen Renstra 2020-2024 dan mempublikasikan ulang dokumen yang telah disahkan. ; **M**emastikan keselarasan sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dalam dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan yang lain seperti dokumen RKT dan PK terutama untuk penulisan narasi maupun keselarasan penetapan target kinerja; **M**enetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yg memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi; **R**encana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.)
- ✓ Dalam pengukuran (**M**enjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment; **M**enyusun mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP sehingga menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; erkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka

- pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance dalam pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi.; Melakukan reviu terhadap IKU secara berkala).
- ✓ Pelaporan (**M**enindaklanjuti rekomendasi dalam BAB IV Laporan Kinerja dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama.; Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment).
 - ✓ Evaluasi Internal (**M**elaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi ; **M**emanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan serta memberikan masukan kepada pemilik program berdasarkan hasil implementasi yang telah dilaksanakan)
 - ✓ Capaian Kinerja (**M**emanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja serta meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur; **M**emanfaatkan hasil evaluasi internal internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja).

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor yang menunjang pencapaian indikator nilai AKIP antara lain :

- Program Inovasi PUSH KINERJA (Publish and Show Up Kinerja) BPOM Ambon menyajikan profil kinerja BPOM Ambon yang disajikan melalui LED Pelayanan public dan media sosial
- Tindak lanjut rekomendasi perbaikan Sebagian besar sudah dilaksanakan secara memadai
- Capaian kinerja sebagian besar sudah memenuhi kriteria keandalan data
- Evaluasi internal masih Sebagian besar sudah ditindaklanjuti bentuk Langkah-langkah nyata
- Pelaporan kinerja sudah dimanfaatkan namun belum maksimal untuk menilai dan memperbaiki kinerja
- System pengukuran sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi

- Monitoring kinerja sudah dilakukan secara memadai dengan pemanfaatan reward dan punishment masih belum maksimal.
- Tindak lanjut Balai POM terhadap rekomendasi pelaksanaan SAKIP BPOM Ambon yang diberikan baik secara internal maupun eksternal.
- Dilakukan rapat monitoring/evaluasi setiap bulan dan triwulan untuk mengidentifikasi kendala dan tindak lanjut yang diperlukan antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan.
- BPOM di Ambon sudah mulai menerapkan pemanfaatan data kinerja (perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pemanfaatan) dalam pemberian reward dan punishment, diantaranya dalam penilaian pencapaian target SKP yang berpengaruh terhadap pemotongan nilai tunjangan kinerja.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai rekomendasi APIP terhadap implementasi SAKIP tahun sebelumnya, yaitu BPOM di Ambon telah melakukan beberapa perbaikan seperti:

- a. Mengesahkan dokumen Renstra 2020-2024 dan mempublikasikan ulang dokumen yang telah disahkan.
- b. Hasil rapat berupa notulen dan laporan-laporan monev disimpan dalam 1 drive Monev.
- c. Point dan capaian keberhasilan serta kegagalan dituangkan dalam Notulen, dan RATL dituangkan dalam Notulen
- d. Membuat RATL LHE untuk 2022
- e. Dokumen perencanaan Renstra 2020-2024 Balai POM di Ambon di turunkan lebih teknis dengan mapping analisa Eksternal-Internal, analisa SWOT dan tujuan startegis
- f. Memastikan keselarasan sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dalam dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan yang lain seperti dokumen RKT dan PK terutama untuk penulisan narasi maupun keselarasan penetapan target kinerja
- g. Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yg memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi;
- h. Rencana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- i. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta

- memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment
- j. Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP sehingga menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - k. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance dalam pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi.
 - l. Melakukan reviu terhadap IKU secara berkala.
 - m. Menindaklanjuti rekomendasi dalam BAB IV Laporan Kinerja dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama
 - n. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment
 - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
 - p. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan serta memberikan masukan kepada pemilik program berdasarkan hasil implementasi yang telah dilaksanakan
 - q. Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja serta meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur
 - r. Memanfaatkan hasil evaluasi internal internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis IX pada tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 25. Indeks Profesionalitas ASN UPT

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. SDM memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan unit kerja melaksanakan program dan kinerjanya. Maka daripada itu, SDM perlu diberikan peningkatan kompetensi melalui suatu pelatihan agar kompeten dalam berkinerja. SDM yang kompeten adalah modal untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas pokok pekerjaannya. Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun. Pengukuran Indeks profesionalitas ASN diperoleh dari hasil survey menggunakan form survey sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS);
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).

Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian Biro SDM adalah **83,18**. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Balai POM di Ambon dibagi total jumlah pegawai di Balai POM di Ambon. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dan mendapat kriteria “Tinggi” dengan capaian terhadap target sangat tinggi yaitu **100,52%**.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 74. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75	83,18	100,52	Memenuhi Ekspektasi

1. Perbandingan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2024

Tabel 75. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon

Realisasi Triwulan IV Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75	83,18	100,52	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 belum melampaui target Renstra tahun 2024, sehingga perlu dilakukan evaluasi penyesuaian target dan alternatif solusi terkait Indeks Profesionalitas ASN UPT supaya dapat memenuhi target tahunan ataupun target Renstra.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN UPT seperti yang sudah dijelaskan di atas dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Sampai pada saat ini BPOM di Ambon telah dilakukan rencana aksi dan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain :

1. Peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP telah dilaksanakan namun tidak semua pegawai tidak merasa optimal dalam mengikuti peningkatan kompetensi secara daring, seperti pelatihan jabatan Fungsional oleh masing-masing Jabatan Fungsional Tertentu oleh instansi Pembina, lalu terdapat Diklat PIM yang seharusnya dilakukan belum terlaksana terlaksana bagi pejabat struktural;
2. Memastikan semua pegawai berkinerja dan dibuktikan dengan dilakukannya penilaian SKP selama 4 (empat) triwulan pada tahun 2022 yang telah dikonversi menjadi SKP tahunan.
3. Telah dilakukan pelaporan dan pengendalian disiplin kehadiran maupun pelaporan mengikuti apel/upacara secara daring.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Memberikan kesempatan bagi pegawai yang akan melakukan Tugas Belajar maupun Izin Belajar yang telah difasilitasi oleh PPSDM dengan memperhatikan disiplin ilmu yang dibutuhkan unit kerja guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kinerja unit kerja BPOM di Ambon;
2. Melakukan peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai, baik itu pejabat Struktural, Fungsional Tertentu, Pelaksana, hingga PNPB untuk diberikan kesempatan meningkatkan kompetensinya baik itu pelatihan secara internal maupun eksternal dengan pihak ketiga;
3. Membuat perjanjian kinerja dan melakukan penilaian kinerja tepat waktu oleh atasan, serta pembinaan pegawai atau konseling guna meningkatkan optimalisasi pelayanan unit kerja baik secara individu maupun secara tim.
4. Melakukan monitoring terkait aspek disiplin pegawai, kode etik dan perilaku pegawai, terutama dalam laporan yang dilakukan secara rutin, seperti laporan disiplin kehadiran dan laporan apel pegawai
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap aspek pengukuran Indeks Profesionalitas ASN UPT pada BPOM di Ambon secara berkala, sehingga data yang ada valid dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, telah dilakukan monitoring secara berkala setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi, terutama Kompetensi Inti dari masing-masing pegawai yang menduduki Jabatan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemantauan kinerja secara berkala juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing dan dilakukan pembinaan berupa konsultasi kepegawaian jika terdapat pegawai yang bermasalah sehingga mengalami penurunan kinerja.

SASARAN STRATEGIS 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon

Pencapaian sasaran strategis X pada tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut

IKSS 26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Standar Ruang Lingkup > 65,
- ✓ Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- ✓ Standar Alat Laboratorium > 70

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 76. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00	78,92	105,22	Memenuhi Ekspektasi

Indikator pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP menggambarkan upaya laboratorium pengujian untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium, dan standar kompetensi personel laboratorium.

Nilai pemenuhan SKL BPOM dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan yang terdiri dari SRL, standar peralatan dan standar kompetensi

masing-masing balai. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter untuk indikator ini dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN).

2. Perbandingan realisasi Triwulan IV Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2024

Tabel 77. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Triwulan IV Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,00	78,92	92,85	Belum Memenuhi Ekspektasi

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 78. Penilaian kemampuan laboratorium BPOM Ambon

No	Bidang/ Laboratorium	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1	Obat dan Nappza	61.8	79.4	64
2	Pangan	79		
3	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72.9		
4	Kosmetik	65.8		
Rata-rata Kimia		69.9	79.4	64
5	Mikrobiologi	66.67	84.2	61.5
Rata-Rata Nilai Pemenuhan (%)		68.3	81.8	62.8
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium		71.0%		

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP antara lain:

- Kegiatan peningkatan kompetensi dan kapabilitas pengujian diantaranya Pertemuan teknis Regionalisasi, Pelatihan pengenalan dan penggunaan GC-MS, Pelatihan Analisa menggunakan instrument (PK logam Pb dalam yoghurt secara AAS), Pelatihan JMHP, Pelatihan ARIS : Sampling and Analysis of Nutmeg, webinar pemeliharaan alat dari vendor penyedia alat, serta pendampingan pengujian terhadap PFM lain untuk mendapatkan bukti dukung kompetensi.
- Dilakukan perencanaan penambahan standar ruang lingkup dan verifikasi method yaitu minimal masing masing 1 untuk setiap penguji pertahun.
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin, baik rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai POM Ambon dihadiri oleh seluruh Bidang; rapat pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan setiap bulan dihadiri oleh perwakilan bidang pengujian dan pemeriksaan; monev pemenuhan GLP oleh ketua tim pendukung mutu dan verifikator setiap bidang pengujian untuk memantau dan menyusun strategi yang diperlukan untuk peningkatan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan pemenuhan standar peralatan dengan memprioritaskan standar minimal dan menuju laboratorium spesifik sesuai GLP. Perlu dipersiapkan perencanaan, monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Ruang Lingkup pengujian yang sesuai standar GLP dengan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan baku pembanding, reagensia, kemampuan uji, dan sampling sampel diluar prioritas sampling .

Adapun permasalahan pengadaan alat laboratorium antara lain :

- ✓ SRL : Pengadaan GCMS yang baru bisa digunakan pertengahan tahun 2021, sehingga belum maksimal dalam pemenuhan SRL, Baku Pembanding belum tersedia (Steviosida, Benzopyrene); Sampel Obat yang tidak tersedia di Maluku dan jumlahnya terbatas (Amiodaron Tablet, Ramipril Tablet); Judul Pelatihan belum mendapat persetujuan dari PPPOMN (Pelatihan PK Pewarna Sudan dalam Saos Cabe)
- ✓ Standar peralatan : Tidak tersedia instrumen LC-MS/MS, ICPMS, KCKT ELSD; Perencanaan pengadaan alat terbatas pada rekomendasi PPPOMN
- ✓ Kompetensi : Tidak meratanya kompetensi di pengujian, karena adanya rotasi personil
Karenanya BPOM Ambon telah melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan di atas dengan mengajukan :
 - a. perencanaan alat yang berbasis standar minimal GLP;

- b. pelatihan, bimtek internal/eksternal dan transfer knowlage untuk pegawai baru pegawai rotasi. Rotasi pegawai tersebut disesuaikan dengan ketersediaan dan kebutuhan kompetensi yang ada;
- c. Pemenuhan reagen media, baku pembanding secara mandiri/tidak melalui PPPOMN, suku cadang, sampel uji, pelatihan kemampuan uji, waktu realisasi untuk memenuhi GAP standar ruang lingkup;
- d. Melakukan monev Pemenuhan Standar Peralatan untuk memantau dan menyusun strategi yang diperlukan.

IKSS 27. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal

Penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Kriteria yang digunakan adalah:

- a. 2,26 – 3 : Optimal
- b. 1,51 – 2,25 : Cukup Optimal
- c. 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- d. 0 – 0,75 : Sangat Kurang Optimal

Terdapat 2 (dua) komponen dalam penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, yaitu :

1. Pemutahiran data

Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam system BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang harus dimutahirkan dalam hal ini adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan

2. Pemanfaatan Sistem

Pemanfaatan Sistem yang dimaksud disini adalah sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja yang terdiri dari Berita Aktual yang ada pada subsite unit kerja, pemanfaatan *Sharing* folder, pemanfaatan dan penggunaan *dashboard* BBC, serta pemanfaatan dan penggunaan email, dalam hal ini adalah email corporate.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022

Tabel 79. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
BPOM di Ambon yang Optimal Triwulan IV

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,25	2,75	122,22	Tidak Dapat Disimpulkan

Pelaksanaan pengukuran atas indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal merupakan hasil assesment dari Pusdatin. Dengan hasil penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal Triwulan IV tahun 2022 sebesar 2,75.

2. Perbandingan Realisasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024

Tabel 80. Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di
Ambon yang Optimal Triwulan IV Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3	2,75	91,67	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penetapan target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Ambon adalah flat selama satu tahun pelaporan. Capaian Triwulan IV tahun 2022 atas Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Ambon sebesar 122,22% dari target Tahun 2022.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kenaikan nilai indeks, antara lain:

- Indeks pemanfaatan sistem informasi – email 2 : Adanya monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada seluruh pegawai untuk selalu mengakses email corporate.

- Indeks pemanfaatan sistem informasi – sharing folder 3 : Adanya konsistensi pemanfaatan sharing folder dan melakukan kegiatan bidang pemeriksaan.
- Indeks pemanfaatan sistem informasi – berita actual 3 : peningkatan jumlah upload berita actual yang diikuti oleh peningkatan jumlah pengunjung hingga rata rata 327 pengunjung/berita actual yang diupload.

Pada indeks Pemutakhiran BOC-SPIMKER nilai komposit 0,4 : dikarenakan petugas selalu tepat waktu dalam melakukan verifikasi kasus keracunan

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor menunjang keberhasilan pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi adalah ketersediaan alat pengolah data dan jaringan WIFI yang cepat yang terjangkau oleh semua personil pegawai BPOM Ambon dan komitmen untuk selalu melakukan pemanfaatan informasi data dan pemutakhiran BOC secara berkala.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rendahnya pemanfaatan beberapa indeks di TW I–III mengharuskan perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut agar target indikator Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tercapai.

SASARAN STRATEGIS 11

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis XI pada tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 28. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman IV DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP dan TUP
- 7) Dispensasi Penyampaian SPM
- 8) Capaian Output

1. Perbandingan target dan realisasi Triwulan IV tahun 2022

Tabel 81. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon

Triwulan IV Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	93,00	89,84	96,60	Belum Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Gambar 28. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM Ambon Triwulan IV Tahun

2022

NO	KODE APPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI KONVERSI ROBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI ROBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN IV DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			NILAI TOTAL
1	061	063	432948	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	Nilai	100,00	81,40	93,79	100,00	100,00	99,57	100,00	100,00	96,85	100%	96,85
					Beban	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,14	18,76	10,00	10,00	9,96	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	90,70				96,67			100,00			

Disclaimer: Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER/S/PIB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

2. Perbandingan realisasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Target 2022

Tabel 82. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Ambon
Triwulan IV Tahun 2022 Terhadap Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi TW IV	% Capaian	Kriteria / Kesimpulan Efektivitas
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	93,00	89,84	96,60	Tidak Memenuhi Ekspektasi

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon kriteria belum memenuhi ekspektasi yaitu 96,60 disebabkan oleh kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan efisiensi penggunaan anggaran yang rendah.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis keenam antara lain :

- ❖ Desk data e-monev dan data manual secara continue untuk menjamin validitas data yang disajikan
- ❖ Menetapkan petugas khusus sebagai penanggungjawab seluruh data kinerja
- ✓ Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis keenam Pengisian rutin e-monev .

antara lain :

- ✓ Pelaporan kinerja sesuai timeline.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :

- Peningkatan kompetensi petugas perencana dan pengumpul data dalam penginputan data agar sesuai dengan timeline
- Monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap *update* data kinerja setiap bulan
- Desk data secara continue
- Mengoptimalkan tim evaluasi kinerja yang ada agar konsisten memantau pencapaian kinerja
- Secara ketat menerapkan sistem penilaian SKP setiap tri wulan berdasarkan cascading yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa BPOM di Ambon telah menerapkan secara konsisten sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, akuntabilitas kinerja BPOM di Ambon, meskipun demikian perbaikan secara continue harus tetap dilaksanakan sehingga dapat ditingkatkan perolehannya di Tahun 2022.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

- Melakukan Desk data monev setiap awal bulan
- Sudah adanya petugas khusus penanggung jawab data kinerja
- Pelaporan Kinerja yang tepat waktu

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Ambon
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

Jabatan : Kepala Balai POM di Ambon

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Ambon, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BPOM di Ambon

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.55
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71.58
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.40
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	56
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77.40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82.75
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
23,670,173,000.00

Pihak Kedua

Ambon, 16 Desember 2021
Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.45	398.903.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78.891.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	246.070.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	10	20	30	40	50	56	62	70	85	95	56	831.537.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	25	35	40	50	60	75	85	95	18	911.079.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	17	28	35	44	55	64	75	85	92	98	100	581.548.600,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	18	30	40	50	60	68	75	85	90	96	100	288.936.440,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	8	12	15	20	25	30	40	50	60	70	78	792.434.000,00
23.	Indeks RB UPT												86	70.426.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												77.40	94.926.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												82.75	702.410.340,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												75	5.030.330.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			0.5			1			1.575			2.25	122.444.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			14			37.5			65.5			93	10.451.240.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	30	40	50	56	62	70	85	95	6	367.269.000,00
	Total													23.670.173.000,00

Ambon, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Ambon



Hermanito, S.Si., Apt., MPPM

Catatan :

Penetapan Target di bawah ini :

- Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- Jumlah Desa Pangan Aman
- Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
- Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Naik

Mengikuti Ketentuan sebagai berikut :

- Target B01 s.d. B11 Menggambarkan Progres Kegiatan
- Target B12 Merupakan Target indikator



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK, 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742 ; Fax : 342742 ; WhatsApp : 0811-4800-222
Email : bpom_ambon@pom.go.id, bpom_ambon@yahoo.com, ulpk_ambon@gmail.com
Website : www.bpomambon.com ; Subsite : ambon.pom.go.id
Instagram : @balaipomambon ; Facebook : Balai POM di Ambon

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

NOMOR HK.02.02.29A.29A5.12.21.334 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di

Ambon Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 17 Desember 2021

**HERMANTOS**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON NOMOR HK.02.02.29A.29A5.12.21.334 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,6

	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,58
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56

		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86
		Nilai AKIP UPT	77,40
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

Lampiran 4. Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPOM Ambon TW IV Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Pembilang	Penyebut	TW I			TW II			TW III			TW IV		
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi	Pembilang	Penyebut	Realisasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	85,55		Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	114	189	60,32	318	442	71,95	615	770	79,87	859	1049	81,89
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	46	60	76,67	89	112	79,46	200	248	80,65	288	339	84,96
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	49	73	67,12	99	160	61,88	218	306	71,24	287	391	73,40
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	17	28	60,71	26	39	71,79	41	54	75,93	91	105	86,67
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	38	45	84,44	63	70	90,00	78	85	91,76	78	85	91,76
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	80,00	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,12
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,87
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71,58	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,15
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,41
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	98,00	rata2 (% keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Rekomendasi hasil		37	37	100	211	211	100	404	404	100	503	503	100
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00			41	61	35,96	87	94	48,88	244	411	69,56	-	-	74,55
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00		Jumlah permohonan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	52	52	100,00	100	100	100,00	17	17	100,00	180	180	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	13	21	61,90	30	40	75,00	61	79	77,22	73	93	78,49

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	113	150	75,33	347	445	77,98	570	771	73,93	792	1042	76,01
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4,45	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM										4,38			4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n				75,00	-	-	80,00	-	-	92,54	-	-	97,78
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,40	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor				0,00	-	-	93,74	-	-	93,45	-	-	94
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n				30,00	-	-	62,50	-	-	70,00	-	-	56
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa	18,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n				25,00	-	-	37,50	-	-	77,50	-	-	18
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas tahun n				20,00	-	-	65,00	-	-	100,00	-	-	6
6	Meningkatnya	22	Persentase	100,00	Jumlah sampel Makanan	Jumlah target sampel	-	-	44,77	-	-	66,94	-	-	85,70	-	-	100
6	Meningkatnya	21	Persentase	100,00	Jumlah sampel Obat	Jumlah target sampel	-	-	46,50	-	-	64,89	-	-	82,96	-	-	96
7	Meningkatnya	23	Persentase	78,00	Perhitungan capaian s.d				10,63	-	-	42,50	-	-	49,69	-	-	88
8	Tervujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	86,00	Hasil indeks RB dari Itama				-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,72
8	Tervujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	77,40	Hasil nilai AKIP dan Itama				-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,92
9	Tervujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75	Hasil Evaluasi dari Biro Umum dan SDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,18
10	Menguatnya laboratorium, pengelolan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional				74,02	-	-	74,57	-	-	76,47	-	-	78,92
10	Menguatnya laboratorium, pengelolan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	hasil assesment oleh Pusdatin				2,5000	-	-	2,6300	-	-	2,75	-	-	3
11	Terkeblanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)				61,51	-	-	59,40	-	-	59,89	-	-	90

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPOM Ambon TW IV Tahun 2022

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Realisasi s.d bulan				
					DESEMBER				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55	859,00	1.049,00	81,89	94,61	94,61
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	288,00	339,00	84,96	93,36	93,36
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	287,00	391,00	73,40	85,35	85,35
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	91,00	105,00	86,67	98,48	98,48
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,00	78,00	85,00	91,76	95,59	95,59
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	80,00	-	-	76,12	95,15	95,15
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60	-	-	92,87	92,87	103,65
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71,58	-	-	71,15	99,40	99,40
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,00	-	-	92,41	96,26	96,26
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00	503,00	503,00	100,00	102,04	102,04
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	-	-	74,55	112,95	112,95
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	180,00	180,00	100,00	102,04	102,04
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	73,00	93,00	78,49	109,02	109,02

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	792,00	1.042,00	76,01	100,01	100,01
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4,45	-	-	4,38	98,43	98,43
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	-	-	97,78	126,99	126,99
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40	-	-	93,76	98,28	98,28
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56,00	-	-	56,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	18,00	-	-	18,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	-	-	6,00	100,00	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	-	-	98,19	98,19	98,19
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	-	-	88,00	112,82	112,82
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	86,00	-	-	90,72	105,49	105,49
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	77,40	-	-	76,92	99,38	99,38
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75	-	-	83,18	100,52	100,52
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00	-	-	78,92	105,23	105,23
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	2,75	122,22	122,22
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00	-	-	89,84	96,60	96,60

Lampiran 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BPOM Ambon Triwulan IV Tahun 2022

Output		Awal 2022		Target APBNP 2022		Realisasi Triwulan IV Tahun 2022		Persentase Capaian		IE	SE	TE	Kategori
		Volume	Pagu (Rp)	output (Volume)	Input (Anggaran)	output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (%)	Input (%)				
EBA994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	608.152.000,00	1	608.152.000,00	1	608.140.500,00	100	99,99	1,00	1	0,00	Efisien
QIA005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1440	984.886.000,00	1440	984.886.000,00	1440	984.691.390,00	100	99,98	1,00	1	0,00	Efisien
QDC001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1600	190.600.000,00	1600	190.600.000,00	1600	188.199.150,00	100	98,74	1,01	1	0,01	Efisien
QCDU48	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	3	367.634.000,00	3	367.634.000,00	3	359.548.333,00	100	97,80	1,02	1	0,02	Efisien
QDB003	Pasar aman dari bahan berbahaya	6	95.060.000,00	6	95.060.000,00	6	93.186.000,00	100	98,03	1,02	1	0,02	Efisien
BDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	69.571.000,00	21	69.571.000,00	21	69.261.050,00	100	99,55	1,00	1	0,00	Efisien
AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	140.754.000,00	14	140.754.000,00	14	140.195.850,00	100	99,60	1,00	1	0,00	Efisien
CAB002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	74.145.350,00	100	98,86	1,01	1	0,01	Efisien
PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1.371.010.000,00	1	1.371.010.000,00	1	1.367.851.251,00	100	99,77	1,00	1	0,00	Efisien
CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	118.424.000,00	1	118.424.000,00	1	117.609.570,00	100	99,31	1,01	1	0,01	Efisien
EBA994	Layanan Perkantoran	1	11.231.669.000,00	1	11.231.669.000,00	1	11.198.750.764,00	100	99,71	1,00	1	0,00	Efisien
QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	435	466.750.000,00	435	466.750.000,00	435	464.750.270,00	100	99,57	1,00	1	0,00	Efisien
RAB001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	3.390.185.000,00	1	3.390.185.000,00	1	3.390.133.500,00	100	100,00	1,00	1	0,00	Efisien
QIA008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	83	71.153.000,00	83	71.153.000,00	83	70.818.700,00	100	99,53	1,00	1	0,00	Efisien
QDB002	Desa Pangan Aman	18	735.042.000,00	18	735.042.000,00	18	731.119.650,00	100	99,47	1,01	1	0,01	Efisien
QDB001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	56	691.166.000,00	56	691.166.000,00	56	687.772.400,00	100	99,51	1,00	1	0,00	Efisien
BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	153	117.465.000,00	153	117.465.000,00	153	117.229.400,00	100	99,80	1,00	1	0,00	Efisien
BMB001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	39	143.077.000,00	39	143.077.000,00	39	141.494.500,00	100	98,89	1,01	1	0,01	Efisien
QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	93	77.444.000,00	93	77.444.000,00	93	38.358.600,00	100	99,43	1,01	1	0,01	Efisien
BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	284.492.000,00	1	284.492.000,00	1	114.882.300,00	100	96,66	1,03	1	0,03	Efisien
QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1029	1.446.388.000,00	1029	1.446.388.000,00	1029	1.435.416.250,00	100	99,24	1,01	1	0,01	Efisien
Total					22.551.018.000,00	22.471.377.028,00	100	99,65	1,01	1,00	0,01	Efisien	

Lampiran 7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Output				Capaian Penyesuaian	Input		IE	TE	Capaian TE				
		Target	Pembilang	Penyebut	Realisasi		(%)	Target				Realisasi	(%)		
SS1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Stakeholder Perspective														
	KSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55	859	1049	81,89	94,61	94,61	94,61	4.890.185.000,00	1.923.837.659,00	39,34	2,35	1,35	64,10%
	KSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	200	248	80,65	88,62	88,62	88,62	284.492.000,00	114.882.300,00	40,38	2,19	1,19	65,41%
	KSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	218	316	68,99	80,22	80,22	80,22	608.152.000,00	471.126.500,00	77,47	1,04	0,04	65,41%
	KSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	41	54	75,93	86,28	86,28	86,28	143.077.000,00	85.141.500,00	59,51	1,45	0,45	65,41%
KSS5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96	78	85	91,76	95,59	95,59	95,59	2.668.809.000,00	2.007.575.137,00	75,22	1,27	0,27	93,92%	

SS6	dan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	KSS18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70	-	-	70,00	100,00	100,00	100,00	945.767.000,00	428.165.700,00	45,27	2,21	1,21	61,88%
		KSS19	Jumlah desa pangan aman	75	-	-	77,50	103,33	103,33	103,33	1.038.579.000,00	446.350.100,00	42,98	2,40	1,40	77,77%
SS7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	KSS20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70	-	-	100,00	142,86	142,86	142,86	239.769.000,00	46.705.500,00	19,48	7,33	6,33	63,98%
		KSS21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	-	-	82,96	97,60	97,60	97,60	471.250.000,00	224.356.130,00	47,61	2,05	1,05	64,01%
		KSS22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	-	-	93,81	110,36	110,36	110,36	1.056.039.000,00	703.206.920,00	66,59	1,66	0,66	49,94%
		KSS23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	-	-	49,69	99,38	99,38	678.204.000,00	242.961.150,00	35,82	2,77	1,77	41,75%	

Learning and Growth Perspective														
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	KSS24	Indeks RB UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KSS25	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KSS26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	KSS27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		KSS28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	-	2,65	117,78	117,78	97,03	1,21	0,21	22,57%
SS11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	KSS29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	65,5	-	-	-	59,89	91,44	91,44	72,41	1,26	0,26	2,50%